



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR W.32-UM.01.02-118

DIBERIKAN KEPADA:

UPTD INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PENGUSUL
KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) INOVASI TERBANYAK

TANJUNGPINANG, 24 APRIL 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH



EDISON MANIK



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202438950, 17 Mei 2024

Pencipta

Nama : Nurgaya Aristantya

Alamat : Jl. Hanjoyo Putro Perumahan Indah Lestari RT 005 RW 003 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29125

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Indri Ayu Ningsih

Alamat : Perumahan Mahkota Alam Raya Blok Anyelir 5 No. 25 RT 005 RW 007 Kelurahan BT.IX Tanjungpinnag Timur, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Basis Data

Judul Ciptaan : Sistem Informasi Logistik Obat Dan Vaksin Secara Elektronik (SILOVe)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 28 Juli 2014, di Tanjung Pinang
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000614306

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAHI
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : KOPERASI KONSUMEN SEGAK BERMARWAH UPTD
INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana
Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Tanjungpinang (Taman Migas) - Pulau Dompak,
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
Indonesia

Tanggal Penerimaan : 26 Agustus 2025

Nomor Pendaftaran : IDM001437286

Etiket Merek :



Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2035, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



[Signature]
Djamar Sulaeman Taman, M.Si., M.IPLaw.
NIP: 197703182003121001

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025044227, 29 April 2025

Pencipta

Nama : **Dewi Kumalasari, Deri Noverlian dkk**
Alamat : KM. 7, Jl. Peralatan No. 03, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29123
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Indri Ayu Ningsih**
Alamat : Perm. Mahkota Alam Raya Blok Anyelir 5 No 25, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29121

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **Survei Implementasi PosyanDu Enam SPM di Wilayah Kepri (SIDEWI)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 April 2025, di Kota Tanjung Pinang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 000884488

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dewi Kumalasari	KM. 7. JL. Peralatan No. 03 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang
2	Deri Noverlian	Tiban Koperasi Blok C no 43 Sekupang, Kota Batam
3	Indri Ayu Ningsih	Perm. Mahkota Alam Raya Blok Anyelir 5 No 25 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang





GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 370 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2030

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pengurus Posyandu dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Tim Pembina Posyandu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu menetapkan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Nomor : 002/KEP/POSYANDU.Pst/II/2025 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina Posyandu pada 34 Provinsi Masa Bakti 2025 - 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat :
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Provinsi.
 2. Ketua :
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Provinsi; dan
 - c. memimpin pertemuan TP Posyandu Provinsi.
 3. Sekretaris :
 - a. melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Provinsi dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Provinsi; dan
 - b. melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Provinsi.
 4. Bendahara :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Provinsi
 5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 6. Anggota Bidang :
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan kesekretariatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Februari 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

AIYAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 370 Tahun 2025
Tanggal : 28 Februari 2025

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2030**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Penasihat
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
3.	Hj. Dra.Dewi Kumalasari Ansar, M.Pd	Ketua Pembina Posyandu Provinsi
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris I
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris II
6.	Nurhani Razak, S.IP Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Bendahara
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Pendidikan
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Mariani, S.St Staf Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	Dra. Sri Rahayu Andani Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Kesehatan
12.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13.	Andi Kurniawan, S.KM., M.PH Administrator Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	Dora Herdiana, S.KM, M.Epid Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Rahimah Azmi Dalimunte, S.KM Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

16.	Sri Rezeki, S.Gz Nutrisionist Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
18.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
19.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
20.	Ahmad Fathony, ST Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
21.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
22.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
23.	Sari Baiti Syamsul, ST., M.M Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
24.	Khanapi, S.T Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
26.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
27.	Yulianti Harpomo, S.Sos, SSt, Mt	Anggota
28.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Sosial
29.	Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
30.	M. Jawad, S.IP Staf Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

31.	Kemistia Eva Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
-----	---	---------

 **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ANSAR AHMAD

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 370 Tahun 2025
Tanggal : 28 Februari 2025

SEKRETARIAT
POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Indri Ayu Ningsih, M.Farm, Apt Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Sekretariat
2.	Nurhani Razak, S.IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Wakil
3.	Hairyzal, S.Sos Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Seksi Administrasi Umum
4.	Aida Agusniman, S.KL UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Aning Nirawati, S.IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Dery Noverlian, S.Kom., MH Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Seksi Teknologi Informasi
7.	Yudha Fahlevi, S.Kom Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Feri Firmansyah Biro Administrasi Pimpinan	Seksi Dokumentasi
		Seksi Pelaporan SPM:
9.	Muhammad Haekal Silin, SE Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	- Bidang Pendidikan dan Bidang Trantibum Linmas
10.	Purwani, S.Sos Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	- Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial

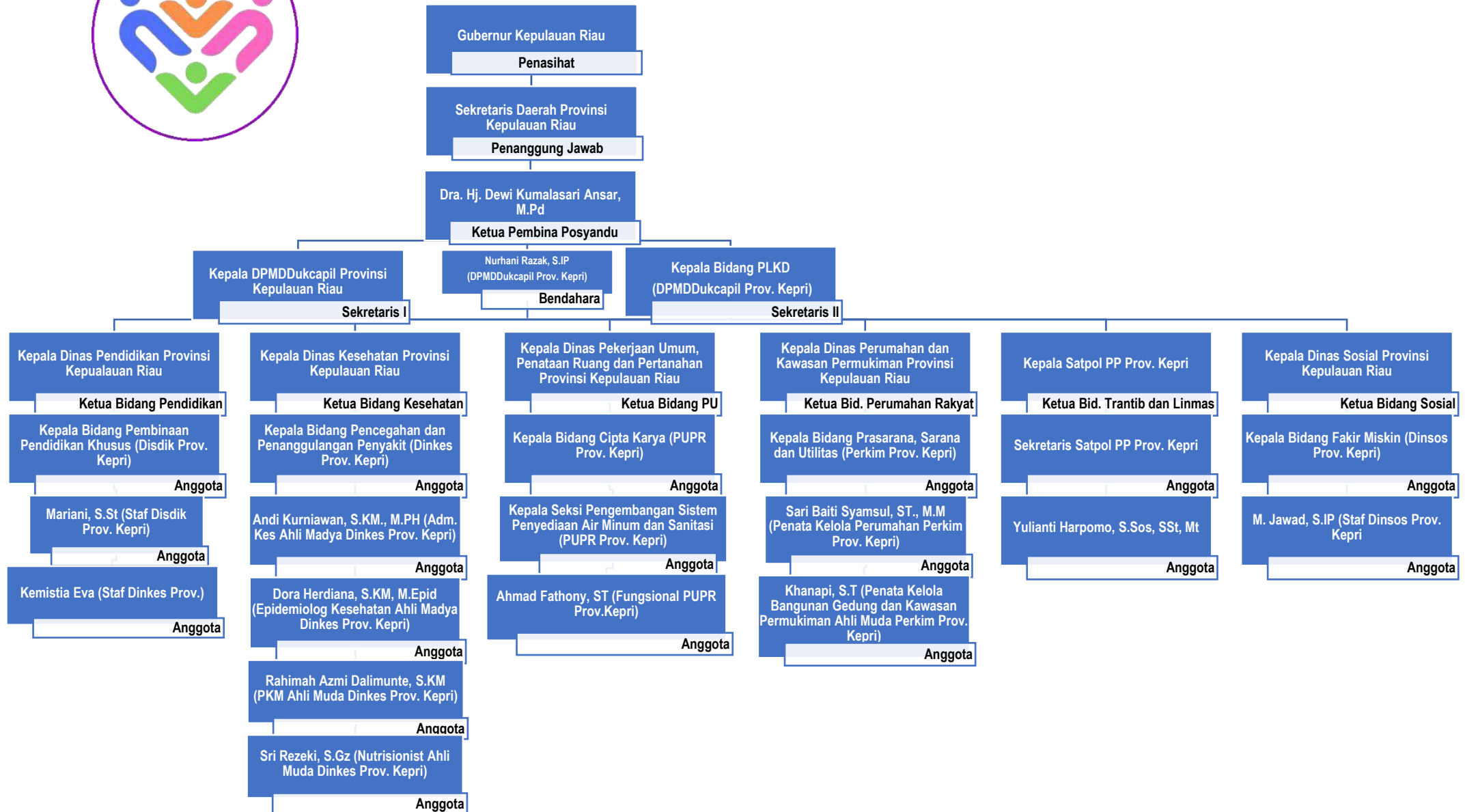
11.	Agustina, S.Tr. IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	- Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
12.	Royyan Abdillah, S.STP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Seksi Perlengkapan dan Sarana
13.	Rizki Sahrianto, S.Sos Dinas Pemberday1aan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	M. Hanafi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Vera Miranti, S.Sos Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

STRUKTUR TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2030



STRUKTUR TIM SEKRETARIAT



KEPALA SEKRETARIAT
Indri Ayu Ningsih, M.Farm, Apt
Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Kepri

WAKIL KEPALA SEKRETARIAT
Nurhani Razak, S.IP
Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri

Ketua Seksi Administrasi Umum
Hairyzal, S.Sos
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Ketua Seksi Teknologi Informasi
Dery Noverlian, S.Kom., MH
DISKOMINFO Prov. Kepri

Ketua Seksi Perlengkapan dan Sarana
Royyan Abdillah, S.STP
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Ketua Seksi Dokumentasi
Feri Firmansyah
Biro Administrasi Pimpinan

Seksi Pelaporan SPM

Anggota
Aida Agusniman, S.KL
UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Kepri

Anggota
Yudha Fahlevi, S.Kom
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Anggota
Rizki Sahrianto, S.Sos
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Anggota
M. Hanafi, S.IP
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Anggota
Vera Miranti, S.Sos
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Anggota
Aning Nirawati, S.IP
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Bid. Pendidikan dan Bid. Trantibum Linmas
Muhammad Haekal Silin, SE
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Bid. Kesehatandan Bid. Sosial
Purwani
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Bid. PU dan Bid. Perumahan Rakyat
Agustina, S.Tr.AP
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Kelompok usaha "Bang Tokif"
Perumahan mahkota alam raya Blok. Anyelir 5 No. 25
Rt. 005/007 kelurahan Batu IX Kecamatan
Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau,
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
Indonesia, 29125

Tanggal Penerimaan : 08 Mei 2024

Nomor Pendaftaran : IDM001246174

Etiket Merek :



Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 08 Mei 2034, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP: 197010161992031001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM001246174

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 11 Desember 2024

(210) Nomor Permohonan : KID2024038676

(220) Tanggal Pengajuan : 02 April 2024
Tanggal Penerimaan : 08 Mei 2024

(551) Kelas Barang/Jasa : 5, 30
(NCL 11)

(591) Uraian warna :
warna putih, hitam, hijau dan kuning

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(320) Data Prioritas :

	Nomor	Tanggal	Negara

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
Kelompok usaha "Bang Tokif"
Perumahan mahkota alam raya Blok.
Anyelir 5 No. 25 Rt. 005/007 kelurahan
Batu IX Kecamatan Tanjungpinang
Timur Provinsi Kepulauan Riau,
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
Indonesia, 29125

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(540) Contoh Etiket:



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 5 :
=== bahan obat untuk penggunaan manusia ===

Kelas 30 :
=== seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); Minuman berbahan dasar teh
bunga telang; Teh rosela; Sereh kering (Bumbu) ===



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring” Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : mail@dinkesprovkepri.org Laman : dinkes.kepriprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 52/SK- DINKES/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK GEMILANG BANG TOKIF (PENGEMBANGAN
TANAMAN OBAT KELUARGA PADA UPTD INSTALASI FARMASI DINAS
KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
 - b. bahwa UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Sarana yang melakukan Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18 Agustus 2023;
 - c. bahwa inovasi pengembangan tanaman obat keluarga untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM kesehatan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung agar pemanfaatan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu kefarmasian serta dilakukan oleh tenaga yang kompeten;



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring” Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : mail@dinkesprovkepri.org Laman : dinkes.kepriprov.go.id

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18 Agustus 2023.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring” Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : mail@dinkesprovkepri.org Laman : dinkes.kepriprov.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Gemilang BANG TOKIF (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau).
- KEDUA** : Pembentukan Kelompok Gemilang BANG TOKIF (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan inovasi pengembangan tanaman obat keluarga terhadap metode, bahan/obat tradisional yang dapat dikembangkan.
 2. Menyelenggarakan pendidikan pelatihan untuk petugas kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terkait produk yang dihasilkan maupun tentang pelayanan kesehatan tradisional yang telah terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk pengembangan dan inovasi yang dilakukan dengan berkoordinasi pada pihak terkait untuk menjamin kualitas dan mutu produk.
 4. Pembiayaan dapat dilakukan melalui sumber perorangan maupun anggaran yang tersedia dari program dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak lain yang mendukung pengembangan produk dengan tetap melakukan pendokumentasian kegiatan dan pelaporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Gemilang BANG TOKIF (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring" Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : mail@dinkesprovkepri.org Laman : dinkes.kepriprov.go.id

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2024



**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DR. MOH. BISRI, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197101091995011001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Daerah Provinsi;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau;
5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring" Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : mail@dinkesprovkepri.org Laman : dinkes.kepriprov.go.id

Lampiran : Pembentukan Kelompok Gemilang BANG TOKIF
(Pengembangan Tanaman Obat Keluarga pada UPTD
Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau
Nomor : 52/SK- DINKES/I/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

Nama-nama Kelompok Gemilang BANG TOKIF (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Ketua : Indri Ayu Ningsih, M. Farm, Apt
Anggota : 1. Nurgaya Aristantya, S. Farm, Apt
2. Warni, S. Farm, Apt
3. Wina Aumeilia, S. Farm, Apt
4. Wiwin Tri Oktoriana, AMF, S. KL

Daftar keanggotaan dapat diperbaharui apabila terdapat penambahan atau kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



DR. MOH. BISRI, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197101091995011001



Proposal Inovasi Bang Tokif

Pengembangan Tanaman Obat Keluarga
di Instalasi Farmasi

Kategori Pelayanan Publik

UPTD Instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan
Mahmud Riyat Syah, Pulau Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

2025



Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber tanaman obat, menjadikannya potensial untuk dibudidayakan secara mandiri di rumah guna memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga dan sebagai upaya masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Tanaman Obat Keluarga (TOGA) didefinisikan sebagai tanaman berkhasiat yang ditanam di pekarangan atau ladang yang dikelola oleh keluarga atau kelompok masyarakat. Jenis-jenis tanaman ini secara tradisional dapat memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan yang bisa dibuat sendiri. Dari 30.000 tanaman obat yang dimiliki Indonesia, sekitar 7.000 di antaranya berkhasiat obat, namun baru sekitar 20% yang telah dieksplorasi.



Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan tanaman obat di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai khasiat dan cara penggunaan tanaman obat, yang menyebabkan pengetahuan tentang berbagai obat herbal dan khasiatnya masih terbatas (S. Siahaan & Aryastami, 2018). Selain itu, hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2011 menunjukkan adanya disparitas usia dalam penggunaannya; masyarakat berusia 50 tahun ke atas cenderung setia menggunakan tanaman obat tradisional, sementara generasi muda lebih memilih obat modern yang dianggap lebih praktis.

Kendala lainnya bersifat struktural dan komersial, yaitu masih terbatasnya tanaman obat yang terstandarisasi, padahal standarisasi penting untuk menjaga mutu dan keamanan penggunaannya. Di sektor bisnis, petani dan pelaku usaha sering kali kurang memahami permintaan pasar domestik dan ekspor yang menginginkan produk siap pakai yang telah diolah. Lebih jauh lagi, fasilitas kesehatan formal seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Praktik Pribadi masih enggan mengintegrasikan obat tradisional dalam pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Sementara itu, sebagai entitas penunjang kesehatan, UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang melayani populasi 2.178.610 jiwa (BPS, 2024), telah didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 dan mulai beroperasi pada tanggal 3 Januari 2024.



Penggagas Inovasi

Dalam rangka pengembangan tanaman obat keluarga, UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan sebuah inovasi bernama Kelompok Gemilang "**BANG TOKIF**" (**Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di Instalasi Farmasi**). Inovasi ini digagas oleh **5 (lima)** orang Tenaga Kesehatan ASN yang bertugas di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

Indri Ayu Ningsih, S.Farm, M.Farm, Apt **Nurgaya** Aristantya, S.Farm, Apt
Warni, S.Farm, Apt **Wina** Aumeillia, S.Farm, Apt
Wiwin Tri Oktoriana, AMF, S.KL.

No	Nama Tenaga Kesehatan	Nomor STR	Masa Berlaku
1	Indri Ayu Ningsih, S.Farm, M.Farm, Apt	AO00000355360232	Seumur Hidup
2	Nurgaya Aristantya, S.Farm, Apt	062872223-81051802	Seumur Hidup
3	Warni, S.Farm, Apt	TY00000527823727	Seumur Hidup
4	Wina Aumeillia, S.Farm, Apt	PQ00001075395982	Seumur Hidup
5	Wiwin Tri Oktoriana, AMF, S.KL	19831002/STRTK_21/2005/2257	2 Okt 2027

Maksud & Tujuan

Kelompok Gemilang **“BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di Instalasi Farmasi)** bertujuan untuk : Pengembangan potensi dan peningkatan kompetensi penggagas Tenaga Kesehatan ASN (Apoteker dan Asisten Apoteker) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.



Sedangkan manfaat yang terdapat Kelompok Gemilang **“BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di Instalasi Farmasi)**, adalah sebagai berikut :

01. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat memantau ketersediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan dan dapat mendukung indikator kinerja.
02. Membina dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Suku Laut Desa Kelumu Kabupaten Lingga dan Desa Panglong Kabupaten Bintan) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait PHBS, Penggunaan obat rasional, meningkatkan taraf hidup dengan memberdayakan Tanaman Obat Keluarga serta pelatihan Pembuatan Sabun dan UMKM untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat kepulauan, perbatasan dan terluar di Provinsi Kepulauan Riau.
03. Membuka Peluang usaha dengan berbagai produk : Si Sella, Si Bulang, Ku Sehat, Grow Kapsul, BisTing dan Sabun yang dihasilkan oleh penggagas dengan kaidah dan formularium serta dilengkapi dengan konsultasi *online* TATA (Tanya Obat dan Tanaman Obat dengan Apoteker).
04. Produk yang telah dihasilkan memiliki Sertifikat halal, NIB, terdaftar dengan sertifikat PKRT, perhitungan Nutrisi Fat pada produk dan dikembangkan dengan adanya pembentukan Koperasi Konsumen Segak Bermawah pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
05. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan Kesehatan dan vaksin telah dilakukan publikasi jurnal ilmiah dan dengan adanya aplikasi SILO sejak 2024 dan pengembangan aplikasi berbasis *barcode* pada 2019 dan pengembangan aplikasi dengan memasukkan pengelolaan vaksin menjadi aplikasi SILOVE dapat menunjang rencana kebutuhan obat di Provinsi Kepulauan Riau yang rasional dengan Metode ABC VEN, *system barcode* dan *located* produk pada tatanan penyusunan barang dengan metode *Supply Chain Management System*. Hal ini berdampak pada kualitas mutu produk sediaan farmasi dan vaksin, serta menjamin Ketersediaan Obat Esensial yang merupakan Indikator Kinerja di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Produk & Karya Inovasi



Si Sella

Sirup Kelopak Bunga Rosella dengan tiga varian: *Original, Low Sugar dan Free Sugar*



Si Bulang

Sirup Bunga Telang dengan tiga varian: *Original, Low Sugar dan Free Sugar*

Kudapan Lezat & Bernilai Gizi (Bingka Labu, Bolu Berendam dan Onde-onde dengan perhitungan Angka Kecukupan Gizi)



Ku Sehat



Grow Kapsul

Kapsul hidup bibit tanaman obat keluarga



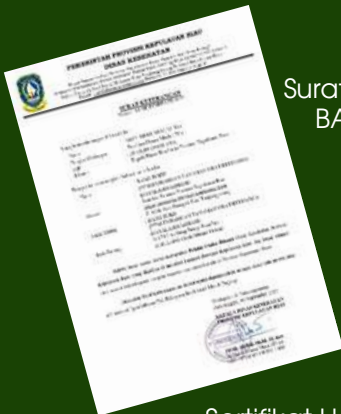
BisTing

Biskuit untuk mencegah Stunting berbahan tanaman obat keluarga (dalam pengembangan)

berbahan tanaman obat keluarga (dalam pengembangan)



Sabun



Surat Penetapan BANG TOKIF



SPP-IRT

Dukungan Kerjasama Bersama Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kepri



Sertifikat Halal



Publikasi Jurnal Ilmiah



Surat Pencatatan Ciptaan





Perjuangan Bang Tokif

1

Produk dan Promosi BANG TOKIF dalam Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



2

Pembibitan Grow Capsule



3

Pembuatan Produk SI BULANG dan SI SELLA



4

Kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kepri untuk pengembangan Ku Sehat (Kudapan Sehat memiliki Angka Kecukupan Gizi) dan BISTING (Biskuit Stanting)



5

Visitasi dari tim otonomi daerah kemendagri untuk inovasi Kelompok Gemilang BANG TOKIF



6

Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan, Pengobatan serta Edukasi Tanaman Obat Keluarga pada Masyarakat Suku Laut, Desa Panglong, Kabupaten Bintan dan masyarakat di Kota Tanjungpinang.



7

Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengobatan serta Pemberdayaan dan Pembinaan pada Masyarakat Suku Laut, Desa Kelumu, Kabupaten Lingga.



8

Pembinaan Penggunaan Tablet Tambah Darah, Pembibitan Tanaman Obat Keluarga pada Siswa/Siswi SMKN 1 Gunung Kijang Kabupaten Bintan.



9

Edukasi Penggunaan Obat dan Sanitasi Hygine pada Siswa dan Siswi SMPN 17 Kota Tanjungpinang dan Motivasi Kewirausahaan pada Mahasiswa/I Se-Kota Tanjungpinang.



10

Aplikasi SILOVe (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin elektronik) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.



11

MoU Pengembangan Tanaman Obat Platform Kelompok Gemilang BANG TOKIF dengan SMKN 1 Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.



13

Pemberdayaan UMKM Platform Kelompok Gemilang BANG TOKIF.



12

Pembentukan Koperasi Konsumen Segak Bermarwah pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



Dampak Setelah



Produk pada Kelompok Gemilang "BANG TOKIF" (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) berhasil meraih Juara 3 Kemilau Wisata Dekra Festival November 2023 sebagai Kue lezat dan bernilai gizi.



Kelompok Gemilang BANG TOKIF telah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Nomor : W.32.UM.01.02-4005 tanggal 27 Mei 2024 yang telah Mengajukan Permohonan Merek Kolektif "BANG TOKIF" di Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2024.



Dampak Setelah

Juara 1 Tenan Expo UMKM Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Penghargaan Koperasi Segak Bermanwah UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Prov Kepri 2025 - BANG TOKIF - Kelompok Gemilang- Dekrafest 2025 dari Gubernur Kepulauan Riau



BangTokif



Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di Instalasi Farmasi

No	Indikator	Keterangan
1	Nama Inovasi Daerah	"BANG TOKIF" Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi
2	Tahapan Inovasi	Implementasi / Penerapan yang sudah terlaksana dari Bulan November Tahun 2023
3	Inisiator Inovasi Daerah	UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
4	Nama Inisiator Inovasi Daerah	Tim Kerja UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
5	Klasifikasi Inovasi Daerah	Inovasi Perangkat Daerah
6	Koordinat	0°52'49"N 104°27'20"E
7	Jenis Inovasi	Non Digital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia
8	Bentuk Inovasi	Inovasi Pelayanan Publik
9	Inovasi Tematik	Inovasi bidang kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) sebagai upaya peningkatan kemandirian pengobatan tradisional, peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis tanaman obat, serta penguatan tata kelola pelayanan kefarmasian di daerah kepulauan, perbatasan, dan terluar.
10	Urusan Inovasi Daerah	Urusan pemerintahan bidang kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasian, pemberdayaan masyarakat, pengembangan tanaman obat keluarga (TOGA), dan dukungan terhadap ketersediaan sediaan farmasi serta peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kesehatan tradisional.
11	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Uji coba dilakukan pada Agustus 2023, melalui kegiatan pembibitan tanaman obat, produksi produk herbal skala kecil, dan edukasi masyarakat di wilayah percontohan (Desa Panglong, Desa Kelumu, dan sekolah-sekolah di Bintan dan Tanjungpinang).
12	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Penerapan inovasi secara resmi dimulai pada Januari 2024, bersamaan dengan operasionalisasi UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Pergub Kepri No. 30 Tahun 2023 s.d. saat ini
13	Waktu Pengembangan Terbaru Inovasi Daerah	Pengembangan terbaru dilakukan pada Mei 2024, ditandai dengan: • Pengembangan aplikasi SILOVe (logistik obat dan vaksin). • Perluasan produk seperti BisTing (biskuit stunting) dan sabun herbal. • Pengajuan hak cipta, sertifikasi halal, dan pembentukan koperasi "Segak Bermarwah".

No	Indikator	Keterangan
14	Tujuan Inovasi Daerah	Inovasi BANG TOKIF bertujuan untuk: • Meningkatkan pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) sebagai alternatif pengobatan tradisional yang aman, murah, dan berbasis kearifan lokal. • Memberdayakan masyarakat di wilayah kepulauan, perbatasan, dan terluar dalam pengembangan TOGA melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. • Mendorong kemandirian pelayanan kefarmasian di daerah melalui integrasi antara layanan, produksi, dan distribusi berbasis digital (aplikasi SILOVe). • Mengembangkan UMKM dan koperasi sektor kesehatan tradisional untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
15	Anggaran	Anggaran pelaksanaan inovasi BANG TOKIF bersumber dari: • Dana operasional UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri (APBD 2023–2025), untuk pembinaan, pelatihan, dan bahan produksi awal. • Dana swadaya tenaga kesehatan/penggagas untuk riset dan produksi awal produk inovatif. • Pendanaan mandiri koperasi dan UMKM binaan hasil keuntungan dari penjualan produk. • Dukungan hibah/kerjasama dari Dinas Koperasi dan instansi lain dalam bentuk non-tunai (pelatihan, fasilitasi legalitas).
16	Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Pengajuan Merek Kolektif "BANG TOKIF" • Diajukan oleh: Kelompok Gemilang BANG TOKIF • Wilayah: Provinsi Kepulauan Riau • Bukti pendukung: Piagam Penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Kepri • Nomor Piagam: W.32.UM.01.02-4005 • Tanggal: 27 Mei 2024
17	Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan	Inovasi BANG TOKIF telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, di antaranya: • Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau ◦ Nomor: W.32.UM.01.02-4005 ◦ Tanggal: 27 Mei 2024 ◦ Diberikan kepada: Kelompok Gemilang BANG TOKIF ◦ Keterangan: Atas pengajuan dan komitmen pengembangan Merek Kolektif dan pencatatan ciptaan inovasi pelayanan kefarmasian. • Juara 3 Lomba Kue Inovasi Gizi (Kategori Kudapan Sehat) – Kemilai Wisata Dekra Festival 2023 ◦ Produk: Ku Sehat (bingka labu, onde-onde, bolu gizi seimbang) ◦ Diselenggarakan oleh: Penyelenggara Festival Dekra Provinsi Kepulauan Riau ◦ Waktu: November 2023



Rancang Bangun Bang Tokif



Inovasi BANG TOKIF dirancang sebagai model tata kelola pelayanan kefarmasian yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan tanaman obat keluarga (TOGA). Rancang bangun inovasi ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: edukasi masyarakat mengenai tanaman obat dan penggunaannya; pembibitan dan pengolahan TOGA menjadi produk bernilai jual; digitalisasi sistem logistik obat; serta pembentukan kelembagaan ekonomi (koperasi dan UMKM binaan).

Inovasi ini berawal dari semangat lima tenaga kesehatan di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pemanfaatan TOGA sebagai upaya mandiri kesehatan berbasis kearifan lokal. Produk-produk seperti sirup Si Sella, Si Bulang, Grow Kapsul, Ku Sehat, dan sabun herbal telah dikembangkan sesuai kaidah kefarmasian dan mendapat legalitas seperti SPP-IRT, sertifikat halal, serta NIB.

Pokok perubahan yang dilakukan adalah:

- Transformasi pola konsumsi masyarakat dari obat modern ke obat tradisional melalui peningkatan pengetahuan dan akses TOGA.
- Digitalisasi sistem logistik dan perencanaan kebutuhan obat melalui aplikasi SILOVe untuk menjamin ketersediaan obat esensial secara efisien.
- Penguatan ekonomi lokal melalui pelibatan masyarakat dalam produksi dan pengolahan TOGA serta pembentukan koperasi konsumen.
- Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dengan pelatihan, pengembangan formulasi produk, dan publikasi ilmiah.
- Kemitraan lintas sektor (Dinas Koperasi, Sekolah, Masyarakat, Kemenkumham) untuk memastikan keberlanjutan inovasi.

Ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan dengan perluasan wilayah binaan, diversifikasi produk TOGA, serta integrasi dengan platform pelayanan kesehatan digital. Inovasi ini diharapkan menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola pelayanan kefarmasian yang adaptif dan berbasis komunitas di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Inovasi BANG TOKIF (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola pelayanan kefarmasian berbasis pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal. Rancang bangun inovasi ini menggabungkan tiga pilar utama: pelayanan kefarmasian, pengelolaan tanaman obat keluarga (TOGA), dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Tahapan Inovasi "BANG TOKIF"

1. Identifikasi Masalah (2022–2023):
 - Terbatasnya pemanfaatan TOGA.
 - Ketergantungan masyarakat pada obat modern.
 - Belum optimalnya sistem logistik obat.
2. Perencanaan Inovasi (Awal 2023):
 - Penyusunan proposal inovasi oleh tenaga kesehatan di UPTD Instalasi Farmasi.
 - Penggalangan komitmen dan dukungan stakeholder.
3. Uji Coba (Agustus–Desember 2023):
 - Edukasi TOGA di desa binaan dan sekolah.
 - Produksi terbatas produk TOGA (sirup, bibit, sabun herbal).
 - Uji logistik berbasis aplikasi awal SILO.
4. Penerapan (Januari 2024):
 - Penerapan penuh program TOGA dan produksi.
 - Peluncuran aplikasi SILOVe (logistik obat & vaksin elektronik).
5. Pengembangan (Mei 2024 – sekarang):
 - Pengembangan produk baru: BisTing, sabun TOGA, Ku Sehat.
 - Pembentukan koperasi "Segak Bermanwah".
 - Pendaftaran HAKI dan kerjasama lintas sektor.



UPTD INSTALASI FARMASI

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
"Bandar Seri Kota Piring" Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
Lantai 2 dan 3 Pulau Dompok Seri Darul Makmur -
Tanjungpinang



TENAGA KESEHATAN KELOMPOK GEMILANG
”BANG TOKIF”
PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT KELUARGA DI UPTD INSTALASI FARMASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber tanaman obat yang bisa dibudidayakan sendiri di rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan dan sebagai upaya masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Tanaman Obat Keluarga merupakan tanaman yang berkhasiat yang ditanam diperkarangan maupun ladang yang dikelola oleh keluarga atau kelompok-kelompok masyarakat. Jenis tanaman yang ditanam dapat memenuhi keperluan keluarga akan kebutuhan obat-obatan secara tradisional yang dapat dibuat sendiri.

Indonesia memiliki 30.000 Tanaman Obat, sekitar 7.000 berkhasiat obat, tetapi baru 20% yang telah dieksplorasi. Tanaman obat kurang berkembang di Indonesia antara lain disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap khasiat dan cara penggunaan tanaman obat. Masyarakat memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai berbagai obat herbal dan khasiatnya (S.Siahaan & Aryastami, 2018).

Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2011 menunjukkan bahwa masyarakat yang setia menggunakan tanaman obat sebagai obat tradisional untuk menjaga kesehatan sebagian besar berusia 50 Tahun ke atas, sedangkan orang muda lebih suka menggunakan obat modern yang lebih praktis. Selain itu, masih terbatas tanaman obat yang terstandarisasi yang diperlukan untuk menjaga mutu dan keamanan penggunaan tanaman obat. Penyebab lain adalah petani dan pelaku usaha yang kurang memahami pasar domestik dan ekspor yang menginginkan produk siap pakai yang telah dilah. Lebih jauh lagi fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Praktek Pribadi masih enggan menggunakan obat tradisional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) Kabupaten, 2 (dua) Kota, 52 Kecamatan dan 299 Kelurahan /Desa dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 2.178.610 jiwa (BPS, 2024). UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang berdiri berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2023 dan beroperasi pada tanggal 3 Januari 2024.

Dalam melakukan pengembangan tanaman obat keluarga UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan sebuah Inovasi dengan nama **Kelompok Gemilang “BANG TOKIF”** (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) yang **digagas oleh 5 (lima) orang Tenaga Kesehatan** yang bertugas di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Indri Ayu Ningsih, S.Farm, M.Farm, Apt
2. Nurgaya Aristantya, S.Farm, Apt
3. Warni, S.Farm, Apt
4. Wina Aumeilia, S.Farm, Apt
5. Wiwin Tri Oktoriana, AMF, S.KL.

Gambar 1. Pengagas Inovasi BANG TOKIF



Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) bertujuan untuk : **Pengembangan potensi dan peningkatan kompetensi penggagas Tenaga Kesehatan ASN dan PPPK (Apoteker dan Asisten Apoteker) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.**

Sedangkan manfaat yang terdapat Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi), adalah sebagai berikut :

1. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat memantau ketersediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan dan dapat mendukung indikator kinerja.
2. Membina dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (**Suku Laut Desa Kelumu Kabupaten Lingga dan Desa Panglong Kabupaten Bintan**) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait PHBS, Penggunaan obat rasional, meningkatkan taraf hidup dengan memberdayakan Tanaman Obat Keluarga serta pelatihan Pembuatan Sabun dan umkm untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat kepulauan, perbatasan dan terluar di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membuka Peluang usaha dengan berbagai **produk : Si Sella, Si Bulang, Ku Sehat, Grow Kapsul, BisTing dan Sabun** yang dihasilkan oleh penggagas dengan kaidah dan formularium serta dilengkapi dengan konsultasi online TATA (**Tanya Obat dan Tanaman Obat dengan Apoteker**);

4. Produk yang telah dihasilkan memiliki **Sertifikat halal, NIB, terdaftar dengan sertifikat PKRT, perhitungan *Nutrision Fat* pada produk dan dikembangkan dengan adanya pembentukan Koperasi Konsumen Segak Bermarwah** pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan Kesehatan dan vaksin telah dilakukan publikasi jurnal ilmiah dan dengan adanya aplikasi SILO sejak 2024 dan pengembangan aplikasi berbasis barcode pada 2019 dan pengembangan aplikasi dengan memasukkan pengelolaan vaksin menjadi aplikasi SILOVE dapat menunjang rencana kebutuhan obat di Provinsi Kepulauan Riau yang rasional dengan Metode ABC VEN, system barcode dan located produk pada tatanan penyusunan barang dengan metode Supply Chain Management System. Hal ini berdampak pada kualitas mutu produk sediaan farmasi dan vaksin, serta menjamin Ketersediaan Obat Essensial yang merupakan Indikator Kinerja di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

B. DATA SEBELUM

Sebagai pengagas Inovasi Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi), 5 (lima) orang Tenaga Kesehatan yang bertugas di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Apoteker dengan nomor :

NO	NAMA TENAGA KESEHATAN	NOMOR STR	MASA BERLAKU
1.	Indri Ayu Ningsih, S.Farm, M.Farm, Apt	AO00000355360232	Seumur Hidup
2.	Nurgaya Aristantya, S.Farm, Apt	062872223-81051802	Seumur Hidup
3.	Warni, S.Farm, Apt	TY00000527823727	Seumur Hidup
4.	Wina Aumeilia, S.Farm, Apt	PQ00001075395982	Seumur Hidup
5.	Wiwin Tri Oktoriana, AMF, S.KL	19831002/STRTTK_21/2005/2257	2 Oktober 2027

Para Pengagas Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) sebelumnya telah memiliki Sertifikat Pelatihan bagi Pelatih / *Training of Trainers* (TOT) Penyuluh Keamanan Pangan Rumah Tangga (IRTP) bagi Tenaga Kesehatan di Wilayah Kerjanya sesuai dengan Nomor : 25306/H/!31/203030105/VI/2019 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta pada tanggal 22 Juni 2019.

**Gambar 2. Sertifikat Pelatihan bagi Pelatih / Trainning of Trainers (TOT)
Penyuluh Keamanan Pangan Rumah Tangga (IRTP) bagi Tenaga Kesehatan
di Wilayah Kerjanya**



Selain Itu, Salah satu Pengagas juga memiliki Sertifikat Penyuluh Kemanan Pangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Nomor : 141/2172/2023

Gambar 3. Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan



Adapun produk dan karya inobasi yang telah dihasilkan dari Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) berupa :

1. **Si Sella** - Sirup Kelopak Bunga Rosella dengan tiga varian : *Original, Low Sugar* dan *Free Sugar*.
2. **Si Bulang** - Sirup Bunga Telang dengan tiga varian : *Original, Low Sugar* dan *Free Sugar*.
3. **Ku Sehat** - Kudapan Lezat & Bernilai Gizi (Bingka Labu, Bolu Berendam dan Onde-onde dengan perhitungan Angka Kecukupan Gizi).
4. **Grow Kapsul** (Kapsul hidup bibit tanaman obat keluarga).

5. **BisTing** -Biskuit untuk mencegah Stunting berbahan tanaman obat keluarga (dalam pengembangan).
6. **Sabun** berbahan tanaman obat keluarga (dalam pengembangan).
7. **Pembentukan Koperasi Konsumen** pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Nama **Koperasi Konsumen Segak Bermanwah**.
8. **Sertifikat Halal Produk** dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. **ID21110012005660923** tanggal 23 November 2023.
9. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat pemenuhan komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) PB-UMKU : 15823004287100010001 dari Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang.
10. **Jurnal ilmiah terpublikasi DOI : 10.25077/josi.v18.n2.p97-106.2019** pada Jurnal Optimalisasi Sistem Industri dengan judul "*Evaluation and Development of Annual Drug Provides Planning at the Riau Islands Province Pharmaceutical Installation*".
11. **Pengembangan APLIKASI** pengelolaan obat dan vaksin pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nama : **SILO (sistem informasi logistik obat) yang dimodifikasi menjadi SILOVe (sistem informasi logistik obat dan vaksin elektronik)** telah dilakukan pendaftaran Merk Hak Cipta dengan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : EC00202438950 tanggal 17 Mei 2024.
12. Piagam Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Kepulauan Riau Nomor W.23.UM.01.02-0005 diberikan kepada : **KELOMPOK GEMILANG BANG TOKIF (PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT KELUARGA UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU)** tanggal 27 Mei 2024 (data dukung dokumen terlampir).

C. INTERVENSI DENGAN INOVASI

Kelompok Gemilang "BANG TOKIF" (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) merupakan Pelaku Usaha Binaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan melalui Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 01/SK/DINKES/IX/2023 tanggal 04 September 2023. Para Penggagas juga memiliki Surat Izin Praktek Apoteker di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Apoteker Penanggungjawab : Indri Ayu Ningsih, S. Farm, M. Farm, Apt. SIPA Nomor : 19840728/SIPA-21.72/2022/2.038 dan Apoteker Pendamping : Nurgaya Aristantya, S. Farm, Apt. SIPA Nomor : 19810518/SIPA-21/2023/2.009.

Gambar 4. Surat Penetapan BANG TOKIF



Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) memproduksi Bahan Baku Obat Tradisional, minuman, pembibitan tanaman, industri sirup dan kosmetik di produksi oleh Pelaku Usaha dari UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau. Kelompok usaha ini membuat dan memperdagangkan berbagai macam jenis olahan tanaman obat keluarga seperti minuman, sirup, kosmetik berupa sabun, bibit tanaman dan obat tradisional.

Pada tanggal 21 Agustus 2023 telah diterbitkannya Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dengan nomor PB-UMKU : 150823004287100010001.

Gambar 5. SPP-IRT



Berbagai Produk “BANG TOKIF” telah lulus uji Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Nomor ID21110012005660923 tanggal 23 November 2023.

Gambar 6. Sertifikat Halal



Sebagai bentuk mendukung dan kerjasama dalam Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) membangun kerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/517/45/DKUKM/2024.

Gambar 7. Dukungan Kerjasama Bersama Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kepri



Dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi (obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik), perbekalan Kesehatan dan vaksin, telah dilakukan publikasi **Jurnal ilmiah** **terpublikasi DOI : 10.25077/josi.v18.n2.p97-106.2019** pada Jurnal Optimalisasi Sistem Industri dengan judul “*Evaluation and Development of Annual Drug Provides Planning at the Riau Islands Province Pharmaceutical Installation*”.

Gambar 8. Publikasi Jurnal Ilmiah



Sedangkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Secara Elektronik (SILOVe) telah Mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202438950 tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Gambar 9. Surat Pencatatan Ciptaan



D. PERJUANGAN SAMPAI KESITU

Dalam rangka melakukan inovasi Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) berbagai upaya telah dilakukan oleh UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau diantaranya :

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1.	Produk dan Promosi BANG TOKIF dalam Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	
2.	Pembibitan <i>Grow Capsule</i>	
3.	Pembuatan Produk SI BULANG dan SI SELLA	
4.	Kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kepri untuk pengembangan BISTING (Biskuit Stanting)	
5.	Visitasi dari tim otonomi daerah kemendagri untuk inovasi Kelompok Gemilang BANG TOKIF	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
6.	Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan, Pengobatan serta Edukasi Tanaman Obat Keluarga pada Masyarakat Suku Laut, Desa Panglong, Kabupaten Bintan dan masyarakat di Kota Tanjungpinang.	
7.	Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengobatan serta Pemberdayaan dan Pembinaan pada Masyarakat Suku Laut, Desa Kelumu, Kabupaten Lingga.	
8.	Pembinaan Penggunaan Tablet Tambah Darah, Pembibitan Tanaman Obat Keluarga pada Siswa/Siswi SMKN 1 Gunung Kijang Kabupaten Bintan.	
9.	Edukasi Penggunaan Obat dan Sanitasi Hygine pada Siswa dan Siswi SMPN 17 Kota Tanjungpinang.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
10.	Edukasi Penggunaan Obat dan Motivasi Kewirausahaan pada Mahasiswa/I Se-Kota Tanjungpinang.	
11.	MoU Pengembangan Tanaman Obat Platform Kelompok Gemilang BANG TOKIF dengan SMKN 1 Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.	
12.	Pembentukan Koperasi Konsumen Segak Bermarwah pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	
13.	Pemberdayaan UMKM Platform Kelompok Gemilang BANG TOKIF.	

E. DAMPAK SETELAH (GRAFIK DAN VIDEO)

Produk pada Kelompok Gemilang “BANG TOKIF” (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga di UPTD Instalasi Farmasi) berhasil meraih Juara 3 Kemilai Wisata Dekra Festival 2023 sebagai Kue lezat dan bernilai gizi.

Gambar 9. Menerima Penghargaan



Dalam meningkatkan indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kelompok Gemilang BANG TOKIF memiliki harapan **“Terwujudnya Kepulauan Riau Sehat, untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Paripurna”**. Nilai Pengabdian Tenaga Kesehatan yang dipegang oleh para penggagas adalah **“Melayani dengan GEMILANG”** :

- Giat** : Memiliki komitmen dan semangat juang yang tinggi dalam bekerja;
- Empati** : Mampu memahami kebutuhan dan membangun kemitraan untuk pelayanan kefarmasian terbaik;
- Maju** : Menciptakan Inovasi, tepat data dengan didukung perkembangan teknologi, menciptakan peluang dan melakukan pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, disiplin dan berdedikasi tinggi;
- Integritas** : Menciptakan komunikasi yang baik dan menjalin sinergi dengan *Stage holder* sesuai kode etik profesi dan prinsip moral;
- Loyal** : Patuh dan taat melalui tindakan yang berkualitas, bekerja tuntas dan melakukan perbaikan terus menerus;
- Akuntabel dan Amanah** : Jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan tepat waktu;
- Nyaman** : Menciptakan ruang pelayanan yang *representative*, fasilitas memadai, petugas yang ramah, dan mengutamakan keamanan dan jaminan mutu;
- Good Pharmacy Practice** : Melaksanakan pelayanan kefarmasian yang baik secara komprehensif, berupa panduan yang berisi sejumlah standar dalam menjalankan praktek profesi.

Kelompok Gemilang BANG TOKIF telah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Nomor : W.32.UM.01.02-4005 tanggal 27 Mei 2024 yang telah Mengajukan Permohonan Merek Kolektif “BANG TOKIF” di Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2024.

Gambar 9. Piagam Penghargaan oleh Kanwil Kemenkumham Kepri





GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1357 TAHUN 2025

TENTANG

NAMA-NAMA INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sebuah upaya untuk memacu setiap perangkat daerah agar dapat menghasilkan inovasi setiap tahunnya;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, maka perlu menetapkan Nama-nama Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kepulauan Riau dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 575);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 870);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1058);

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/100.3.4/1/BPPP-SET/2025 tentang Pelaksanaan Gerakan Satu Instansi Menghasilkan Satu Inovasi di Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-Nama Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- KEDUA** : Nama-Nama Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor :
 Tanggal :

**NAMA-NAMA INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 TAHUN 2025**

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
1.	Yuk Kerja Sama	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2.	Beasiswa Mahasiswa dan Mahasiswi Kepulauan Riau	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
3.	SIPULAND (Sistem Informasi Pelaporan Mubaligh Hinterland)	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
4.	JELITA HIBAH (Jejaring Efektif, Layanan Integratif, Tertib, Akurat – Hibah)	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
5.	SIPRODA (Sistem Produk Hukum Daerah)	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6.	SISK (Sistem Informasi Surat Keputusan)	Biro Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
7.	Optimalisasi Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Melalui Integrasi dan Pengembangan SIPPD	Biro Perekenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
8.	SIDADANG (Sini Daftar dan Dagang)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
9.	SIJABAT (Sistem Informasi Jabatan)	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
10.	SIDARA (Sistem Pendapatan Kendaraan)	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
11.	E-book Data Kepri	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
12.	SINERGI ADPIM (Sistem Informasi Efektif Realisasi Giat dan Inovasi Agenda Pimpinan)	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
13.	Peningkatan Kinerja Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Melalui Pengembangan Website	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
14.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehumasan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
15.	Optimalisasi Data dan Informasi Perencanaan dengan Menggunakan <i>Google Looker Studio</i> di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
16.	KLIK KOSAN (Klinik Konsultasi Pengawasan)	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
17.	KEDAI KOPI KEPRI (Komunikasi Enjoy dan Mudah Membangun Integritas Melalui Konsultasi Online Pengawasan Inspektorat Kepri)	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
18.	MIBEDIL (Media Berbasis Digital)	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
19.	Peningkatan mutu SMK melalui optimalisasi pelayanan BLUD	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
20.	Optimalisasi Penyelenggaraan Kearsipan Melalui Penatausahaan Arsip Keuangan Berbasis Digital Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
21.	Optimalisasi Tim Kerja Pengelolaan Berbasis Data Platform Merdeka Mengajar Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMAN Kab. Bintan dan Kab. Natuna Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
22.	Transformasi Sekolah Reguler Menjadi Sekolah Inklusi: Upaya Pemerataan Akses Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
23.	Pemetaan dan Pemerataan Guru PNS dan Pemanfaatan Aplikasi SIGEO pada Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
24.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui fitur layanan kenaikan gaji berkala dan pemberian apresiasi petugas layanan terbaik	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
25.	SIBADANG (Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan Kepri Gemilang)	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
26.	TEMULAWAK (Temukan, Laporkan, Awasi, dan Kolaborasi)	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
27.	GERCEP ANTING (Gerakan Percepatan Atasi Stunting)	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
28.	SI MASS KARYEE (Peningkatan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Success Rate</i>) Melalui <i>Screening</i> Massal Karyawan Yee)	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
29.	MONETASI (Program Monitoring, Evaluasi, Pemutakhiran data Imunisasi Provinsi Kepulauan Riau)	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
30.	Peningkatan Kinerja Dinas Kesehatan Melalui Pengembangan Posyandu Holistik Terintegrasi	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
31.	Strategi Percepatan ODF Terverifikasi Tingkat Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penurunan Stunting Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
32.	Pemanfaatan Teknologi Digitalisasi dalam memback-UP Data Arsip Aktif pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
33.	PEKAN TASIK IMUNISASI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendampingan Petugas Pengelola Program Imunisasi Provinsi Kepulauan Riau)	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
34.	Optimalisasi Administrasi Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Klinik Pratama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
35.	SAWAL TIBA (SKRINING AWAL TBC ANDA Transformasi Skrining TBC yang Terintegrasi dengan Pemeriksaan XRay Mobile)	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
36.	Penguatan Sistem Krisis Kesehatan dan Tanggap Darurat di Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
37.	SI JANTAN (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
38.	SISTARI (Sistem Informasi dan Sinkronisasi Program Penataan Ruang Kepulauan Riau)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
39.	SI PENJARAH SISIR (Sistem Pengelolaan Tinja Daerah Pesisir)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
40.	KLIR (Klinik Rumah Layak Huni)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
41.	SI KARTINI (Sistem Informasi Kegiatan dan Sarana Umum Terkini)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
42.	Sistem Informasi Data Perencanaan Kegiatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
43.	SI SAID (Sistem Smart Aplikasi Integrasi Data Perumahan)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
44.	SIPPERDA (Sistem Informasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
45.	Tim Quick Response Penanganan Bencana Kebakaran Gedung Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
46.	SIKSKepri	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
47.	FIITA (<i>Family Intelligent Assistant</i>)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
48.	DISURGA (Diskusi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
49.	Sekolah Perempuan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
50.	P2K3 (Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
51.	Transformasi pada Pelayanan Antar Kerja Untuk Penyuluhan, Bimbingan Jabatan, dan Bimbingan Karir Melalui Inovasi Berbasis AI Agent	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
52.	Peningkatan Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi melalui Pelatihan Durasi Pendek Menggunakan Metode <i>Blended Learning</i> dan <i>E-Learning</i>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
53.	Aplikasi SIADP (Sistem Informasi Arsip Digital Pelatihan)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
54.	SIPGEDSI (Sistem Pendaftaran <i>Gender Equality Disability and Sosial</i> Inklusi)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
55.	Sinergitas Pelaksanaan Pelatihan dengan Kebutuhan Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
56.	SILENTUR DESA KEPRI (Sistem <i>E-Learning</i> Aparatur Desa Provinsi Kepulauan Riau)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
57.	SIDARA KEPRI (Sistem Informasi Data Aparatur Desa Kepulauan Riau)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
58.	SIDEWI (Survei Implementasi Posyandu Enam SPM di Wilayah Kepri)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
59.	Digitalisasi Sistem Pelaporan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Terminal Pelabuhan Rakyat	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
60.	SAVIRAH (Peningkatan Kualitas Pelayanan Ruang VIP Melalui Standar Pengelolaan Bandara VIP Raja Haji Fisabilillah)	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
61.	Optimalisasi Pengaturan Lalu Lintas Pengguna Jasa Mempertimbangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
62.	ANTASENA (Antrian Transparan, Aman, dan Nyaman)	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
63.	SMART (Sistem Manajemen Riwayat Aset)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
64.	DARA BIJAK (Data Bicara Kebijakan Berdampak)	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
65.	Akselerasi Aksi Pengembangan Pada Portal Web Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
66.	SUBSIDI MARGIN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
67.	DARA (Digitalisasi dan Restorasi Arsip)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
68.	SiPanDU (Sistem Pangkalan Data UKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
69.	ALPUKAT (Aplikasi Uji Kelayakan dan Kepatutan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
70.	DITEK (Ditech.Coop. Digitalisasi Terintegrasi dan Pengawasan Efektif)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
71.	Layanan <i>Call Center</i> Perizinan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
72.	Model Pendampingan Usaha Terintegrasi Berbasis Potensi Lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
73.	Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Melalui Forum Pentahelix	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
74.	KOMSENKU (Koment Centre Pelayanan Koperasi dan UMKM Kepri)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
75.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Melalui Pelatihan Manajemen Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
76.	KERIS (Kepulauan Riau Preneur Sinergi)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
77.	SIDASI (Sistem Informasi Data Investasi Kabupaten dan Kota)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
78.	KLINIK INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
79.	Festival Atletik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
80.	LOVE U CALLING (Cinta Perpustakaan Keliling)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
81.	Layanan Konsultasi Penelitian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
82.	AQUA DBMS (<i>Aquaculture Data Base Management System</i>)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
83.	Optimalisasi Pengelolaan Informasi Kehumasan Di Sosial Media dan Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
84.	Optimalisasi Verifikasi SPJ Melalui Pendampingan, Penyusunan Buku Panduan SPJ dan Verifikasi Serta SOP Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
85.	Sistem Jemput Bola Penjualan Es	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
86.	Promosi Pariwisata Lima Bahasa	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
87.	LAKID (Layanan Kekayaan Intelektual Digital)	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
88.	SOP Kepariwisata Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
89.	SIAPIK KEPRI (Sistem Aplikasi Informasi Kebudayaan)	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
90.	ALAM BERTASBIH (Aktivitas Layanan Umum Balai Sertifikasi Benih)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
91.	Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Untuk Masyarakat Petani Di Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
92.	KEPRI TERANG	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
93.	DIELEKTRIK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
94.	SIDOI (Sistem Informasi Hidrogeologi Berbasis Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
95.	ESDM PRIMA (Evaluasi Sistem dan Manajemen ASN Profesional, Responsif, Integritas, Melayani dan Akuntabel)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
96.	INBOK (Informasi Bahan Pokok Komoditas)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
97.	KKD KEPRI (Klinik Kemasan dan Desain)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
98.	SILAPAK (Sistem Laporan dan Pengaduan Konsumen)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
99.	Fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi pelaku industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
100.	Pendirian UPTD BPSMB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
101.	SIAPRI (Sistem Aplikasi Penyusunan RKBMD Kepri)	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
102.	SIGAP KASDA (Sistem Pengendalian Pembayaran Pada Kas Daerah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
103.	SIBIJAK (Sistem Informasi Bayar Pajak Alat Berat)	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
104.	SILAT KEPRI	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
105.	APLIKASI TALENTA KEPRI	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
106.	APLIKASI SIAP	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
107.	OAC KEPRI	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
108.	SPJ CERMAT	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
109.	ASETERA	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
110.	E-BANGTUR	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
111.	SIMANJA	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
112.	DEJAFU	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
113.	IHT K-POP	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
114.	KAWAN BECAKAP	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
115.	DILAN KGB	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
116.	CANDI	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
117.	TALENTA-IN	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
118.	e-Kinerja Kepri	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
119.	BETUAH (Berorientasi Target dan Ukur Akhir Hasil)	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
120.	Sembang Melayu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
121.	LMS LIGAT KEPRI (<i>Learning Management System</i> Aplikasi Ruang Belajar Aparatur Kepri)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
122.	<i>Coaching</i> Aparatur Sipil Negara	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
123.	Peningkatan Kualitas Akreditasi Pelatihan Melalui Digitalisasi Dokumen Berbasis <i>Cloud</i> di BPSDM Provinsi Kepulauan Riau	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
124.	Kemas (Kesbangpol Masuk Sekolah)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
125.	Web Simpel Om (Website Sumber Informasi dan Pelayanan Organisasi Masyarakat)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
126.	Gebyar Pelajar Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
127.	Rembuk Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
128.	SANDI (Sistem Administrasi Aset Kesbangpol Digital dan Informatif)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
129.	Sarapan Bubur Pedas (Podcast)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
130.	JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
131.	BORIS (Border Information System)	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
132.	Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
133.	Permata Kepri, Pendataan Elektronik Perantau Masyarakat Asal Kepulauan Riau	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
134.	Selasa Berbahasa Inggris Fasih	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
135.	Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
136.	RenTik TasKin (Optimalisasi Perencanaan Tematik Dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
137.	Jurnal Archipelago	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
138.	Brida Menyapa	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
139.	Sistem Informasi Database Infrastruktur Berbasis Geospasial	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
140.	DIMAS (Digital Management Aset Sistem)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
141.	Koordinasi Perencanaan Vokasi (KOPI-V)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
142.	Perencanaan Implementasi Ekonomi Hijau Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
143.	Si Rebah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
144.	Celoteh Sehat	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
145.	24 KRAT Aja	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
146.	Pelayanan One Day care Hemato-Onkologi Anak (ODC HOA)	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
147.	Hemodialisa Edukasi Untuk Mu (HEMODU)	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
148.	CORONCES (Counselling Orientasi Ramah ODHA dan Care Excellent Service)	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
149.	SIKRISNATOP (Intervensi Krisis Kolaborasi dengan Lintas Sektor dan OPD)	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
150.	LaMe dikecup OdayS (Layanan <i>Medical Check Up One Day Service</i>)	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
151.	Simpel (Survei Instan Mutu Pelayanan)	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
152.	Sincan (Sistem Informasi Dokumen Perencanaan)	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
153.	Optimalisasi Kecepatan Waktu Tunggu Obat Pasien Rawat Jalan di RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
154.	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 636 tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pengendalian Uji Mutu Bahan Konstruksi (UPTD Laboratorium, Bahan Konstruksi, dan Peralatan)	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
155.	BANG TOKIF (Pengembangan Tanaman Obat Keluarga pada UPTD Instalasi Farmasi)	UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
156.	SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik)	UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
157.	Instalasi Farmasi Kelas Dunia	UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
158.	ABAH OPA (Administrasi Bantuan Hilirisasi Operasional Perikanan)	UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Cabang Karimun
159.	SIMANDA (Sistem Informasi Manajemen Data Kendaraan Bermotor)	UPTD Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Tanjungpinang
160.	Profesionalisme Tim Penagihan Bersahabat Dan Kontribusi Dealer Second	UPTD Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Tanjungpinang
161.	TANJAK LOBAM (Taat Pajak Lobam)	UPTD Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Bintan
162.	Bidik Bintang (Dashboard Monitoring Digital Kinerja Petugas Penagihan Bintang)	UPTD Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Bintan
163.	SIDIA (Sistem Informasi Digitalisasi Inventarisasi Aset)	UPTD Pelayanan Pajak Daerah SAMSAT Karimun
164.	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Budidaya Ikan (TPUPI) Melalui Gerai Akselerasi Perizinan (GAP) Pada Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Anambas
165.	Pengoptimalan Manajemen Pemeliharaan Benih Melalui Database Berbasis Android (Sibebbi) UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	UPTD Balai Benih Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
166.	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan, Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Batam
167.	Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP)	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Natuna
168.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir melalui Optimalisasi Usaha Perikanan berkelanjutan (Siansar Lanjut)	Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Lingga
169.	Kampanye Keselamatan Pelayaran	Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tarempa
170.	Gerbang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
171.	Peningkatan Penataan Arsip Pelatihan Berbasis Digital di BLKPP Kepulauan Riau	Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP)
172.	Pembangunan Sistem Pendidikan Yang Berkelanjutan	SMAN 1 Siantan
173.	DEDIKA (Digitalisasi Ekonomi Daerah Inovatif Kampung UMKM Bintan)	SMKN 1 Bintan Timur
174.	Mesin Pengering Ikan Asin	SMKN 3 Tanjungpinang
175.	Jentris Bawang Merah	SMKN 3 Tanjungpinang
176.	Magang Anak Negeri Kawasan Industri Kepri	SMKN 3 Tanjungpinang
177.	Kolaborasi Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK Kepri	SMKN 3 Tanjungpinang
178.	VOKEPRI Welding Class	SMKN 3 Tanjungpinang
179.	SIDIK (Sistem Informasi Digital Konseling)	SMKN 3 Tanjungpinang
180.	LD 0.1 SEA CLEANER (Alat Pembersih Sampah Laut)	SMKN 3 Tanjungpinang
181.	BEPUSING TURBIN ANGIN	SMKN 3 Tanjungpinang
182.	Digitalisasi Literasi	SMAN 6 Tanjungpinang
183.	Aplikasi simongu	SMAN 20 Batam
184.	SEHATI	SMAN 4 Tanjungpinang
185.	Berpancang Amanah, Bersauh Marwah	SLBN Bintan
186.	Program SIAP (Sukses Menghadapi Masa Depan)	SLBN Bintan
187.	Website SMKN 1 Tanjungpinang	SMKN 1 Tanjungpinang
188.	SKANSA IoT CAFE	SMKN 1 Tanjungpinang
189.	CARE PET IoT	SMKN 1 Tanjungpinang

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
190.	Buku Batas Online ✓	SMKN 1 Tanjungpinang
191.	Greenuity	SMKN 1 Bintan Utara
192.	Sistem Aquaculture Berbasis IOT ✓	SMKN 1 Bintan Utara
193.	Aplikasi Rental Kendaraan Kepri ✓	SMKN 1 Bintan Utara
194.	Sahabat Angklung	SLBN Karimun
195.	Green Art	SLBN Karimun
196.	Pengembangan Alat Cap Batik dari Limbah Daur Ulang Sebagai Upaya Pemberdayaan Industri Rumahan	SMKN 2 Batam
197.	Pengelolaan Sampah dan Pertanian Sederhana	SMAN 2 Singkep
198.	DR. NONA ANANAS C.L.M Deteksi Merkuri Pada Kosmetika Menggunakan Ekstrak Buah Nanas	SMAN 1 Katang Bidare
199.	Talam Sehidang (DATA PELAYANAN MANAJEMEN SEKOLAH SIAP TAYANG)	Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga
200.	Recycling Maggot untuk Lingkungan Ayu "RENTAK MELAYU"	SMAN 1 Belat
201.	SAMPO (Sampah Menjadi Pupuk Organik)	SMAN 1 Belat
202.	Inovasi Alat Ukur Timbangan Dan Tinggi Digital Dengan Analisis BMI	SMKN 8 Batam
203.	Obat Kulit Enceng Gondok (Pemanfaatan Tanaman Gulma sebagai Obat Herbal)	SMAN 5 Karimun
204.	Krim luka Bakar Daun Mengkudu (Pemanfaatan Limbah Alami menjadi Krim untuk mengatasi luka bakar)	SMAN 5 Karimun
205.	Water Clean up Technology (Solusi Permasalahan Sampah di Perairan)	SMAN 5 Karimun
206.	BIBUNG (Biskuit Ikan Kembung) Inovasi Gen Z Dalam Pengembangan Biskuit Ikan Kembung Sebagai Pencegah Stunting	SMAN 5 Karimun
207.	(Geniscaring) Sebagai Aplikasi Edukasi Untuk Membantu Remaja Peduli Permasalahan Antar Remaja	SMAN 5 Karimun
208.	Gerakan Sekolah Menanam (GSM)	SMAN 1 Bintan Timur
209.	Website Tata Usaha SMA Negeri 1 Bintan Timur	SMAN 1 Bintan Timur
210.	SEB (Smantang Eco Briket)	SMAN 1 Mantang
211.	Sampan Nelayan Kepri Ramah Lingkungan dari Limbah Plat Bekas Kapal	SMKN 10 Batam
212.	SIPMAKASI (Sistem Pembelajaran Matematika dan Elektronik Vokasi)	SMKN 3 Batam
213.	Low Pollution Waste Diposal : A Sustainable Environmental Solution	SMKN 3 Batam

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
214.	AMIRA (Artificial Mentor for Intelligent Reasoning and Assistance)	SMKN 4 Tanjungpinang
215.	SILAP (Sistem Informasi Layanan Aplikasi Pendidikan)	SMKN 4 Tanjungpinang
216.	Immersive Kepri Gallery	SMKN 4 Tanjungpinang
217.	Aplikasi Bel Sekolah	SMKN 4 Tanjungpinang
218.	Perpustakaan Digital Online (SLiMS)	SMKN 4 Tanjungpinang
219.	AR School Fire Safety	SMKN 4 Tanjungpinang
220.	SeBanDing (Sehari Bisa Ngoding)	SMKN 4 Tanjungpinang
221.	Peluang Kejadian Bersyarat Pada Pembelajaran Berdiferrensiasi Dengan Alur Mediasi	SMKN 4 Tanjungpinang
222.	Modul ajar dan Videl Pembelajaran Interaktif	SMKN 4 Tanjungpinang
223.	TYRA	SMKN 4 Tanjungpinang
224.	Penerapan Hybrid Broadcasting Televisi & Platform Digital	SMKN 4 Tanjungpinang
225.	Program BALISTIK (Baca-Tulis-Artikan)	SMKN 4 Tanjungpinang
226.	ASKA (Asisten Karir Remaja)	SMKN 4 Tanjungpinang
227.	SIPS	SMKN 4 Tanjungpinang
228.	SITamu	SMKN 4 Tanjungpinang
229.	SIKEMAS (Sistem Keluar Masuk Siswa)	SMAN 1 Tanjungpinang
230.	PADAN (Pangkalan Data Pendidikan Anambas)	Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas
231.	SIMOTANI (Sistem Monitoring dan Kendali Tanaman Hidroponik Berbasis IoT)	SMKN Kundur
232.	PETAS (Petetas Telur Otomatis Berbasis IoT)	SMKN Kundur
233.	Pembuatan Sabun Mandi Cair Berbahan Dasar Rumput Laut	SMKN 1 Moro
234.	Absensi Digital Menggunakan Kartu Pelajar Siswa Elektronik (E-KPS) Berbasis RFID	SMKN 1 Gunung Kijang
235.	Boga BeGe ProDuKTif (Tata Boga dan Hidroponik SMAN 2 Kundur Sebagai Sebuah Green School Branding Berkolaborasi dengan MBG Kec. Kundur Utara dalam Mengimplementasikan Program Dual Track yang Inovatif)	SMAN 2 Kundur
236.	(ANDAMIKA) Anemometer Dan Mitigasi Kecepatan Angin	SMAN 2 Batam
237.	SENDARA BIOINDIKATOR GEL: Pemanfaatan Antosianin Buah Senduduk (Melastoma Malabathricum L.) Yang Tumbuh Liar Di	SMA Negeri 1 Bunguran Timur

NO	NAMA INOVASI	NAMA INSTANSI
1	2	3
	Kabupaten Natuna Sebagai Teknologi Bioindikator Pencemaran Udara	
238.	CALCOCO-HEAT: Heatpack Aktif Air Berbasis Kapur (Calcium Oxide) dan Serat Kelapa (Cocos nucifera) untuk Mengatasi Kondisi Dingin Pengungsi Pasca Banjir	SMA Negeri 1 Bunguran Timur
239.	FERBANARA : Pemanfaatan Limbah Batang Pisang Dan Air Beras Dalam Pembuatan Pupuk Kompos Cair Untuk Peningkatan Kualitas Tanah	SMA Negeri 1 Bunguran Timur
240.	Larvitrap Berbasis Teknologi Tepat Guna untuk Menekan Perkembangbiakan Nyamuk	SMA Negeri 1 Bunguran Timur
241.	GREENY BITES Kukis Daun Kelor	SMA Negeri 1 Bunguran Timur
242.	Optimalisasi Pemanfaatan Cengkeh (Syzygium aromaticum) Sebagai Aromaterapi Roll on untuk Mengatasi Nyeri Otot	SMA Negeri 1 Bunguran Timur
243.	PESER (Penghapus Geser)	SMA Negeri 1 Bunguran Timur
244.	Batik Bauksit : Inovasi Pewarna Alami Berbasis Sumber Daya Lokal sebagai Inovasi pada SMAN 1 Toapaya	SMAN 1 Toapaya Bintan
245.	SIJAGUR (Si Jagoan Pemotong Rumput)	SMAN 1 Singkep

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos el: dinkes@kepriprov.go.id Laman: dinkes.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 206/DINKES/VI/2026

TENTANG

TIM SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB) PADA

UPTD INSTALASI FARMASI

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas perbekalan kesehatan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu disusun Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) untuk mendukung pengelolaan perbekalan kesehatan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk pembentukan Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
- 1 . Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
 4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

- Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 2197 / 2023 tentang Formularium Nasional;
 9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD Instalasi

Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

10. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1410

Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Formularium

Provinsi Kepulauan Riau;

11. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1411

Tahun 2024 tentang Formularium Provinsi

Kepulauan Riau;

12. *International Organization for Standardization*

9001:2015 tentang Manajemen Mutu;

13. *Good Storage Distribution Practice* WHO;

14. Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2025

tentang Cara Distribusi Obat yang Baik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

TENTANG TIM SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI

OBAT YANG BAIK (CDOB) PADA UPTD INSTALASI

FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Administrasi, Tim ISO 9001;2015, dan Tim *Good Storage Distribution Practice* (GSDP) WHO dan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) yang masing-masing bertugas:

1. Tim Administrasi bertugas:
 - a. membuat, dan memberi masukan teknis ilmiah dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Administrasi dan Pencatatan Pelaporan;
 - b. melakukan penilaian terhadap setiap tahapan pembuatan SOP terkait Administrasi dan Pencatatan

Pelaporan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau; dan

- c. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan.

2. Tim ISO 9001;2015 bertugas:

- a. Membuat, memberi masukan dan evaluasi terkait persiapan dan penerapan ISO 9001;2015 tentang Manajemen Mutu;
- b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan ISO 9001;2015 tentang Manajemen Mutu yang telah ditetapkan; dan
- c. Melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan.

3. Tim *Good Storage Distribution Practice* (GSDP) WHO dan

Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) bertugas:

- a. menyusun daftar SOP dan dukungan teknis dalam penerapan GSDP WHO dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang akan diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala;

- b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan perubahan terkait implementasi yang akan diterapkan sesuai standar GSDP WHO dan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB);
- c. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan.

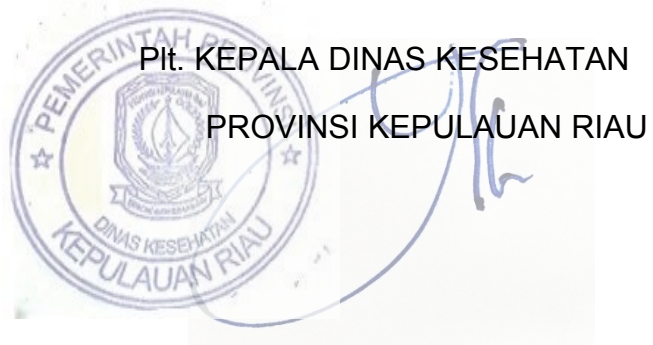
KETIGA : Tugas Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) bertanggung jawab menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) dibebankan pada DIPA UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Juni 2026



dr. Yosei Susanti, M.A.P

NIP. 197709072006042027

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR 206/DINKES/VI/2026

TENTANG

TIM SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG

BAIK (CDOB) PADA UPTD INSTALASI FARMASI

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB) PADA
UPTD INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

Penasehat : dr. Yosei Susanti, M.A.P Pengarah

I. KETUA TIM : - Indri Ayu Ningsih, S. Farm, M. Farm, Apt

II. TIM ADMINISTRASI : - Uun Yulis Ramdani, S.E

- Sovi Rahmawati, AMd

- Nora

- Marmadi

- Dimas Eza Airlangga, S. Sos

III. TIM ISO 9001;2015 : - Vita Dianawati, Amd. Kep

- Nurgaya Aristantya, S.Farm, Apt
- Wiwin Trioktoriana, AMF, S. KL
- Muhammad Zulkarnaen, ST
- Dian Harini Fitri, Amd. Keb
- Ramona Cica Fitria

IV. TIM GSDP DAN SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK

(CDOB)

- : - Ns. Sulistiawati, S. Kep, M. Kep
- Warni, S. Farm, Apt
 - Rianto Sahputra Purba, S. Farm
 - Wina Aumeilia, S. Farm, Apt
 - Muhammad Harris Harman



dr. Yosei Susanti, M.A.P
NIP 197709072006042027



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos el: dinkes@kepriprov.go.id Laman: dinkes.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 206/DINKES/VI/2026

TENTANG

TIM SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB) PADA
UPTD INSTALASI FARMASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas perbekalan kesehatan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu disusun Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) untuk mendukung pengelolaan perbekalan kesehatan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk pembentukan Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat :

- 1 . Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 2197 / 2023 tentang Formularium Nasional;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
10. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1410 Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Formularium Provinsi Kepulauan Riau;
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1411 Tahun 2024 tentang Formularium Provinsi Kepulauan Riau;
12. *International Organization for Standardization* 9001:2015 tentang Manajemen Mutu;
13. *Good Storage Distribution Practice* WHO;
14. Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
TENTANG TIM SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI
OBAT YANG BAIK (CDOB) PADA UPTD INSTALASI
FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Administrasi, Tim ISO 9001;2015, dan Tim *Good Storage Distribution Practice* (GSDP) WHO dan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) yang masing-masing bertugas:

1. Tim Administrasi bertugas:

- a. membuat, dan memberi masukan teknis ilmiah dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Administrasi dan Pencatatan Pelaporan;
- b. melakukan penilaian terhadap setiap tahapan pembuatan SOP terkait Administrasi dan Pencatatan Pelaporan di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- c. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan.

2. Tim ISO 9001;2015 bertugas:

- a. Membuat, memberi masukan dan evaluasi terkait persiapan dan penerapan ISO 9001;2015 tentang Manajemen Mutu;
- b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan ISO 9001;2015 tentang Manajemen Mutu yang telah ditetapkan; dan
- c. Melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan.

3. Tim *Good Storage Distribution Practice* (GSDP) WHO dan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) bertugas:

- a. menyusun daftar SOP dan dukungan teknis dalam penerapan GSDP WHO dan Cara Distribusi Obat yangn Baik (CDOB) di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang akan diimplimentasikan dan dievaluasi secara berkala;
- b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan perubahan terkait implementasi yang akan diterapkan sesuai standar GSDP WHO dan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB);
- c. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan.

KETIGA : Tugas Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) bertanggung jawab menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) dibebankan pada DIPA UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Juni 2026

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



dr. Yosei Susanti, M.A.P
NIP. 197709072006042027

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 206/DINKES/VI/2026
TENTANG
TIM SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT
YANG BAIK (CDOB) PADA UPTD INSTALASI
FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
(CDOB) PADA UPTD INSTALASI FARMASI DINAS
KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Penasehat : dr. Yosei Susanti, M.A.P Pengarah
- I. KETUA TIM : - Indri Ayu Ningsih, S. Farm, M. Farm, Apt
- II. TIM ADMINISTRASI : - Uun Yulis Ramdani, S.E
- Sovi Rahmawati, AMd
 - Nora
 - Marmadi
 - Dimas Eza Airlangga, S. Sos
- III. TIM ISO 9001;2015 : - Vita Dianawati, Amd. Kep
- Nurgaya Aristantya, S.Farm, Apt
 - Wiwin Trioktoriana, AMF, S. KL
 - Muhammad Zulkarnaen, ST
 - Dian Harini Fitri, Amd. Keb
 - Ramona Cica Fitria

IV. TIM GSDP DAN SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
(CDOB)

- : - Ns. Sulistiawati, S. Kep, M. Kep
- Warni, S. Farm, Apt
 - Rianto Sahputra Purba, S. Farm
 - Wina Aumeilia, S. Farm, Apt
 - Muhammad Harris Harman

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



dr. Yosei Susanti, M.A.P
NIP 197709072006042027



| 2025

PROPOSAL INOVASI

“INSTALASI FARMASI KELAS DUNIA”



Pengagas
Indri Ayu Ningsih, S.Farm, M.Farm, Apt
Kepala UPTD Instalasi Farmasi

UPTD Instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



PENGAGAS INOVASI



INDRI AYU NINGSIH, S.Farm., M.Farm, Apt

Indri Ayu Ningsih, S.Farm., M.Farm, Apt
NIP. 19840728 200803 2 003
Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah, dengan fungsi utama meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan. Upaya ini mendukung misi strategis peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan SDM yang berdaya saing, yang diukur melalui indikator seperti Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting pada balita. Pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan kesehatan sendiri merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar manusia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bermutu, termasuk ketersediaan dan mutu sediaan farmasi. Obat, vaksin dan perbekalan kesehatan menjadi unsur penting dalam pelayanan kesehatan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan terstandar di fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menjamin ketersediaan dan kualitas obat, termasuk penerapan regulasi ketat, pengadaan yang terencana, sistem pemantauan yang kuat, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu, edukasi masyarakat tentang penggunaan obat yang bijak dan pengendalian harga turut menjadi bagian dari strategi meningkatkan akses dan efektivitas layanan kefarmasian. Semua ini ditujukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh obat yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan logistik farmasi di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan tersebut meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan Obat yang belum optimal, minimnya anggaran untuk pemenuhan Instalasi Farmasi sesuai Standar, obat kadaluarsa, serta terbatasnya peralatan penyimpanan dan sistem informasi. Oleh karena itu, Aksi Perubahan yang diusulkan bertujuan untuk mendorong transformasi menuju UPTD Instalasi Farmasi yang sesuai standar internasional ISO 9001:2015 dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) WHO, sebagai upaya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan farmasi di daerah.





LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan OPD yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, mencakup penyusunan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan. Peran ini mendukung misi ketiga Pemerintah Provinsi, yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan SDM yang berdaya saing, yang tercermin dari peningkatan Angka Harapan Hidup dan penurunan stunting.

Pembangunan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2023. Upaya ini meliputi layanan kesehatan yang bermutu, edukasi, peningkatan gizi, serta pengendalian penyakit. Dalam hal ini, fasilitas kefarmasian memegang peranan penting dalam pengelolaan sediaan farmasi seperti obat, vaksin, dan alat kesehatan.

Namun, UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain penyusunan RKO yang belum optimal, tingginya jumlah obat kedaluwarsa, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta kendala dalam pemastian mutu sediaan farmasi.

Permasalahan tersebut berasal dari tiga aspek utama, yaitu keterbatasan data, sumber daya manusia, dan sarana teknis. Ketidadaan sistem data yang terintegrasi dan standar menyebabkan informasi tersebar, tidak terdigitalisasi, dan menyulitkan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat.

Menyadari pentingnya sistem logistik farmasi yang andal, Aksi Perubahan disusun untuk mendorong UPTD Instalasi Farmasi menerapkan standar ISO 9001:2015 dan pedoman GSDP WHO. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan mutu layanan, efisiensi distribusi, dan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

TUJUAN & MANFAAT



Tujuan

TUJUAN

- Terlaksananya pelayanan kefarmasian pada UPTD Instalasi Farmasi sesuai standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) WHO.
- Tersedianya dokumen untuk pemenuhan penerapan ISO 9001:2025 dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) berstandar WHO untuk peningkatan Pelayanan Kefarmasian.



Manfaat

JMANFAAT

- Terlaksananya pelayanan kefarmasian pada UPTD Instalasi Farmasi sesuai standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) WHO.
- Tersedianya dokumen untuk pemenuhan penerapan ISO 9001:2025 dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) berstandar WHO untuk peningkatan Pelayanan Kefarmasian.

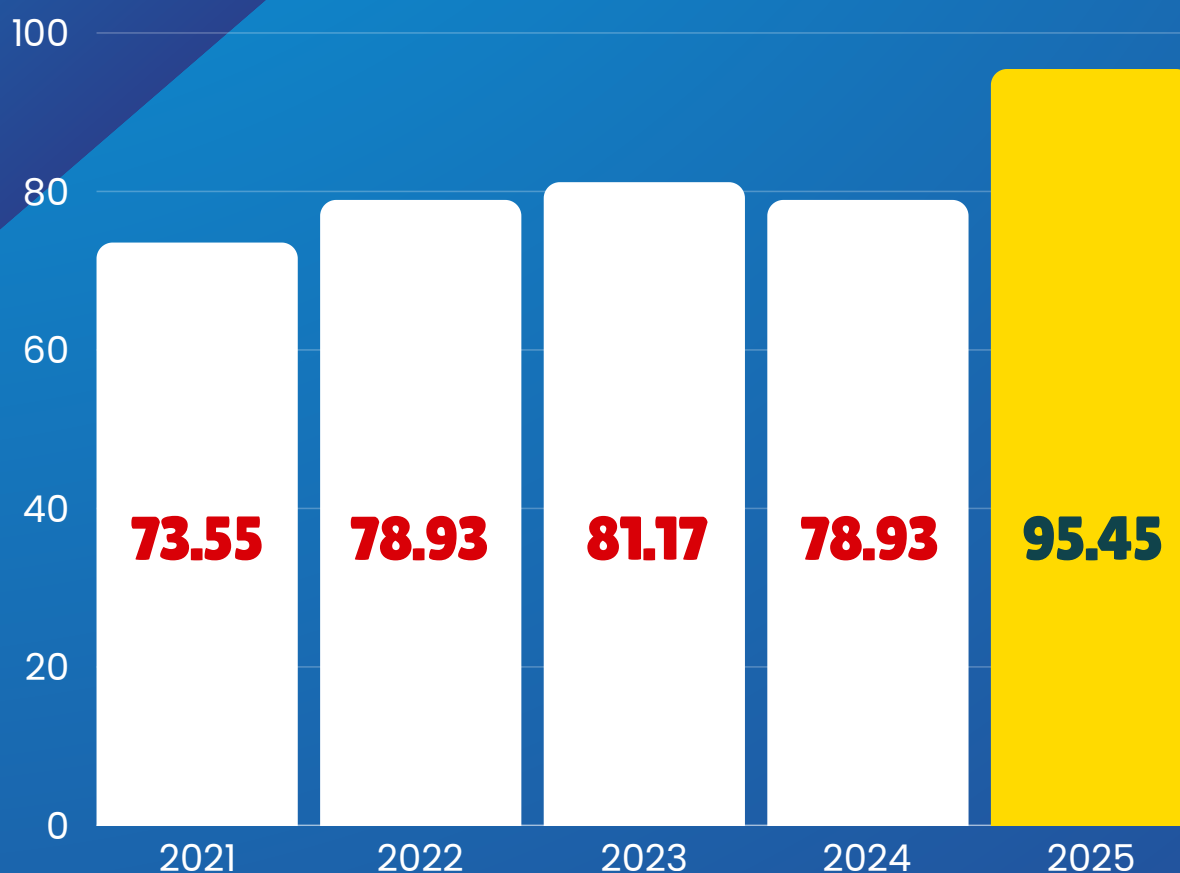


CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja adalah Meningkatkan Persentase Instalasi Farmasi Sesuai Standar yang Belum Tercapai.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Instalasi Farmasi ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	80%	95,45%

REKAPITULASI INSTALASI FARMASI SESUAI STANDAR
TAHUN 2021-2025



Grafik tersebut menunjukkan bahwa "Instalasi Farmasi Kelas Dunia", kinerja Instalasi Farmasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai skor 95,45. Lonjakan ini menandai perbaikan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan efektivitas penerapan standar ISO 9001:2015 dan GSDP WHO dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.



CAPAIAN INOVASI

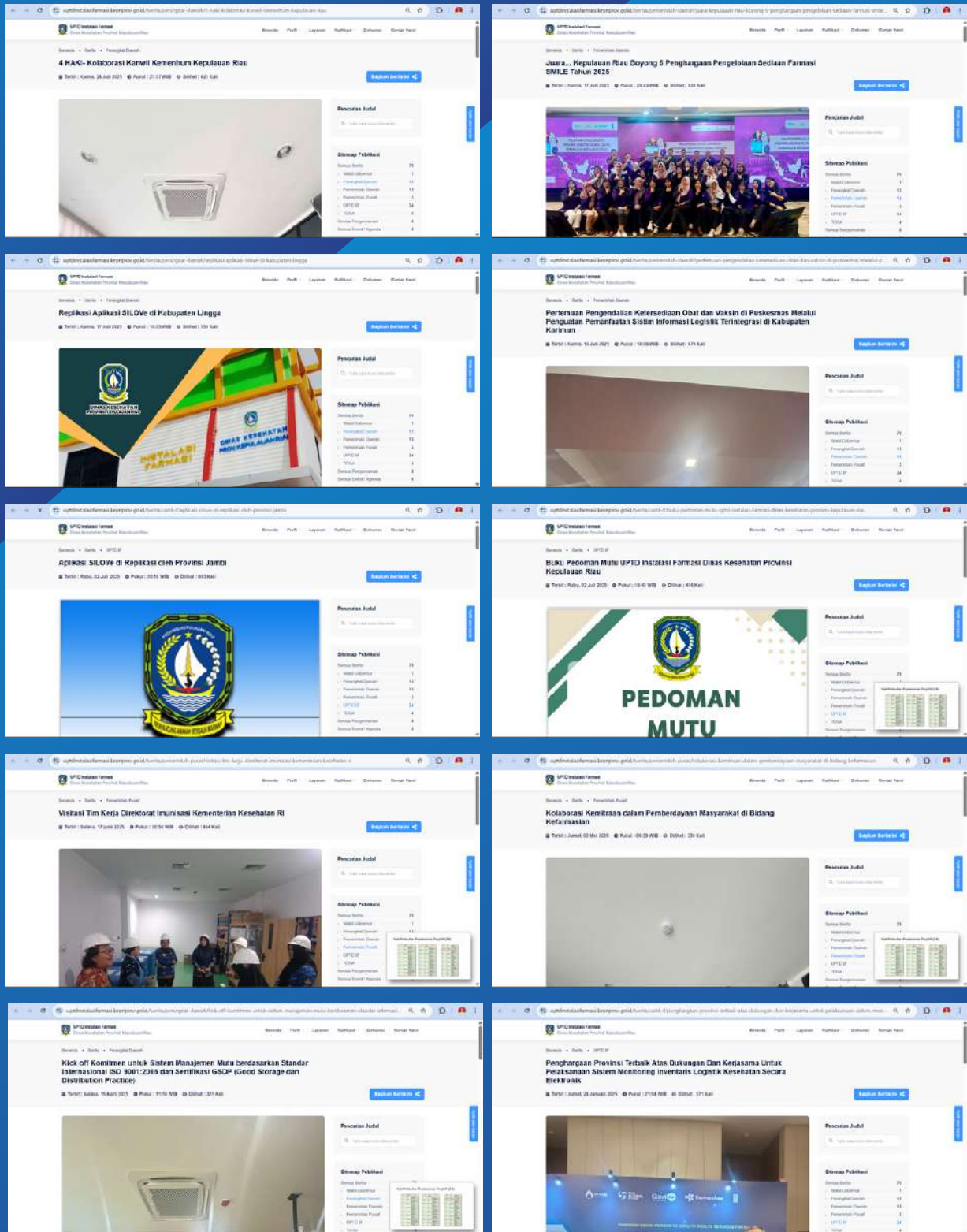
“INSTALASI FARMASI KELAS DUNIA”

**PENERAPAN ISO 9001:2015 DAN GOOD STORAGE
DISTRIBUTION PRACTICE (GSDP) WHO DI UPTD INSTALASI
FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**



PUBLIKASI

Publikasi Melalui Web UPTD Instalasi Farmasi



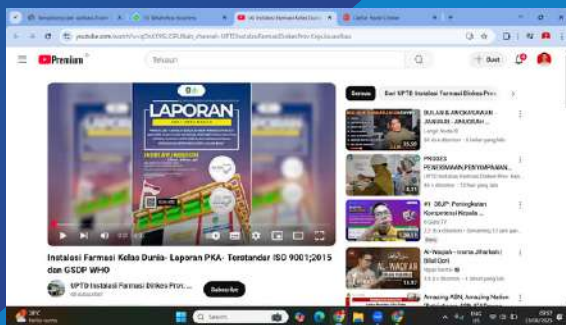


PUBLIKASI

Publikasi Melalui Web UPTD Instalasi Farmasi



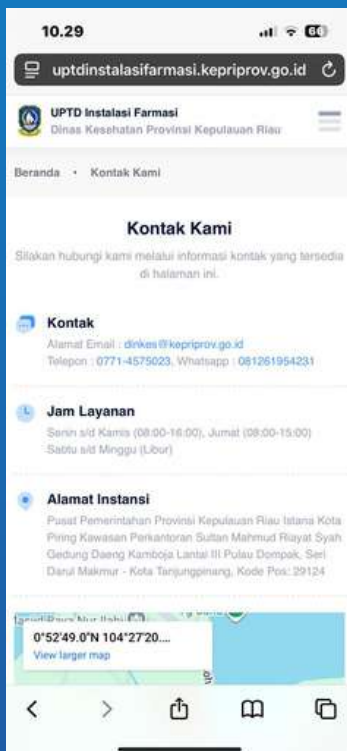
Publikasi Melalui Youtube UPTD Instalasi Farmasi



Publikasi Melalui Instagram UPTD Instalasi Farmasi

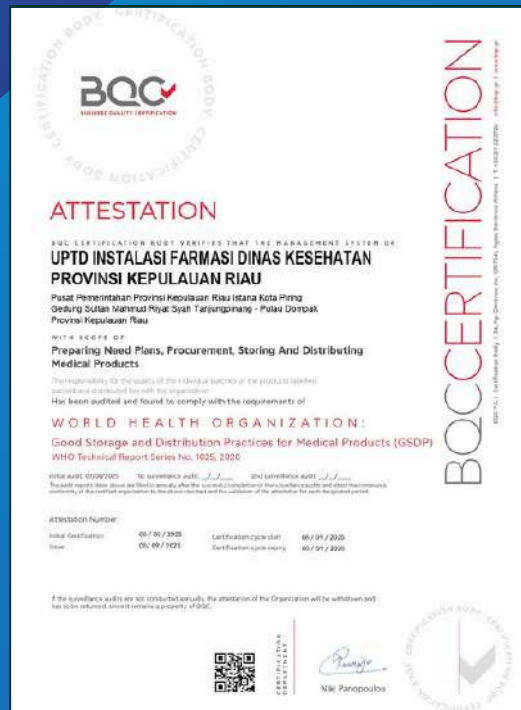


Survey Kepuasan Konsumen dan Keluhan Pelanggan





SERTIFIKAT ISO, GSDP & HAKI





REPLIKASI

REPLIKASI APLIKASI SILOVE (SISTEM INFORMASI LOGISTIK OBAT DAN VAKSIN ELEKTRONIK)

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
Jambi, 24 Juni 2025

Nomor : S-SP/Disikes 5.1/V/02025
Sifat : Pening
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SILOVE

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Selubungan dengan upaya Peningkatan Pengelolaan Obat dan Vaksin serta Perbekalan Kesehatan di Wilayah Provinsi Jambi, dan dalam rangka penyebarluasan informasi inovasi Pelayanan Publik, dengan ini Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, khususnya Instalasi Farmasi Provinsi Jambi meminta adanya Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, sosialisasi dan replikasi Aplikasi SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) yang telah diterapkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Tempat : Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Waktu : 09.00 WIB selesai
Agenda : Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik)

Untuk informasi lebih lanjut agar dapat menghubungi: Sdr. Betty Yundastri, S. Farm (0853-782-6178).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

[Signature]
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Rafaela Dina S. Farm, Apt
NIP. 19831025 198303 1 003

1. PROVINSI JAMBI

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
A. Rada Rana Kai, Kampung Bayu Kai, Tanjungpinang Kota - Tanjungpinang
Kecamatan: 05-11-1002025 Pua 2025

Tanjungpinang, 23 Juni 2025

Nomor : B00/SP/RS 2.1.01/02025
Sifat : Bina
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Replikasi dan Sosialisasi Aplikasi: Penedasan Obat

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Cq. Instalasi Farmasi
di
Tanjungpinang

Selubungan dengan upaya Peningkatan Pengelolaan Obat dan Vaksin serta Perbekalan Kesehatan di Kota Tanjungpinang, dan dalam rangka penyebarluasan informasi inovasi Pelayanan Publik, dengan ini UPTD BPFAK Kota Tanjungpinang meminta adanya Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, Replikasi dan sosialisasi Aplikasi SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) yang telah diterapkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Tempat : BPFAK Kota Tanjungpinang
Waktu : 09.00 - selesai
Agenda : Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, Replikasi dan sosialisasi Aplikasi SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik)

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

[Signature]
KEPALA UPTD BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN KOTA TANJUNGPINANG
RATNA SARI HARAHAP, S. Farm, Apt
NIP. 198212 201001 2 009

2. KOTA TANJUNGPINANG

REPLIKASI AKSI PERUBAHAN "INSTALASI FARMASI KELAS DUNIA" PENERAPAN ISO 9001:2015 DAN GSDP WHO

KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPTD INSTALASI FARMASI
Jl. Pramuka No. 7 Sel. Harapan Sekupang Kota Batam
Telp. (0778) 8815410 Email : instalasifarmasibatam12@gmail.com

Batam, 01 Agustus 2025

Nomor : 400.7.20/ 5/3 /NII/2025
Sifat : Bina
Lampiran : 1
Hal : Replikasi dan Sosialisasi Inovasi "Instalasi Farmasi Kelas Dunia" Penerapan ISO 9001:2015 dan GSDP WHO

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Selubungan dengan upaya Peningkatan Pengelolaan Obat dan Vaksin serta Perbekalan Kesehatan di Kota Batam, dan dalam rangka penyebarluasan informasi inovasi Pelayanan Publik dan upaya menjamin kualitas mutu serta keakuratan obat vaksin, dengan ini UPTD Instalasi Farmasi Kota Batam meminta adanya Best Practice UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Replikasi dan Sosialisasi Inovasi "Instalasi Farmasi Kelas Dunia" Penerapan ISO 9001:2015 Manajemen Mutu dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) Standar WHO yang telah diterapkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025
Tempat : UPTD Instalasi Farmasi Kota Batam
Waktu : 09.00 - selesai
Agenda : Best Practice UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Replikasi dan Sosialisasi Inovasi "Instalasi Farmasi Kelas Dunia" Penerapan ISO 9001:2015 Manajemen Mutu dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) Standar WHO

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Signature]
Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Batam
Rafaela Dina S. Farm
NIP. 19831025 200604 2 009

Tembusan Kepala Yth:
1. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS KESEHATAN
UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
A. Yis Sutanra No 10, Km 20/11, 20180
TANJUNGPINANG, KOTA TANJUNGPINANG

Tanjung Balai Karimun, 19 Juni 2025

Nomor : 400.7.5.7031/BPFAK/V/02025
Sifat : Pening
Perihal : Permohonan Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SILOVE

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Selubungan dengan upaya Peningkatan Pengelolaan Obat dan Vaksin serta Perbekalan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Karimun, dan dalam rangka penyebarluasan informasi inovasi Pelayanan Publik, dengan ini BPFAK Kabupaten Karimun meminta adanya Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, sosialisasi dan replikasi Aplikasi SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) yang telah diterapkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 22 Juni 2025
Tempat : BPFAK Kabupaten Karimun
Waktu : 09.00 - selesai
Agenda : Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, sosialisasi dan replikasi Aplikasi SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik)

Besar harapan kami agar dapat dibantu sebagai arahan dan bimbingan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

[Signature]
Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Kabupaten Karimun
Rafaela Dina S. Farm, Apt
NIP. 19831025 201802 1 001

3. KABUPATEN KARIMUN

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
Jalan Cendrawasih, Singkep, Lingga Kepulauan Riau 29871
Pia-01-R.lingga@gmail.com

Singkep, 20 Juni 2025

Nomor : GSDP/BPFAK-TU/2025
Sifat : Bina
Lampiran : 1
Perihal : Permohonan Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SILOVE

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Selubungan dengan upaya Peningkatan Pengelolaan Obat dan Vaksin serta Perbekalan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Lingga, dan dalam rangka penyebarluasan informasi inovasi Pelayanan Publik, dengan ini UPT BPFAK Kabupaten Lingga meminta adanya Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, sosialisasi dan replikasi Aplikasi SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) yang telah diterapkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 14 Juli 2025
Tempat : UPT BPFAK Kabupaten Lingga
Waktu : 09.00 - selesai
Agenda : Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, sosialisasi dan replikasi Aplikasi SILOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik)

Besar harapan kami agar dapat dibantu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

[Signature]
Kepala UPT BPFAK Kabupaten Lingga
Rafaela Dina S. Farm, Apt
NIP. 19831025 200404 2 030

Tembusan Kepala Yth:
1. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga
2. Arsip

4. KABUPATEN LINGGA

INSTALASI FARMASI KELAS DUNIA

No	Indikator	Keterangan
1	Nama Inovasi Daerah	Instalasi Farmasi Kelas Dunia
2	Tahapan Inovasi	Implementasi / Penerapan yang sudah terlaksana dari Bulan Agustus Tahun 2025
3	Inisiator Inovasi Daerah	UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
4	Nama Inisiator Inovasi Daerah	Indri Ayu Ningsih, S.Farm., M.Farm., Apt
5	Klasifikasi Inovasi Daerah	Inovasi Perangkat Daerah
6	Koordinat	0° 52'49"N 104° 27'20"E
7	Jenis Inovasi	Non Digital
8	Bentuk Inovasi	Inovasi Pelayanan Publik
9	Inovasi Tematik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
10	Urusan Inovasi Daerah	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Kesehatan.
11	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Juni s.d. Agustus 2025
12	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Agustus 2025 s.d. saat ini
13	Waktu Pengembangan Terbaru Inovasi Daerah	September 2025
14	Tujuan Inovasi Daerah	• Terlaksananya pelayanan kefarmasian pada UPTD Instalasi Farmasi sesuai standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) WHO. • Tersedianya dokumen untuk pemenuhan penerapan ISO 9001:2025 dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) berstandar WHO untuk peningkatan Pelayanan Kefarmasian.
15	Anggaran	DPA UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau
16	Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Pengajuan Merek Kolektif "BANG TOKIF" • Diajukan oleh: Kelompok Gemilang BANG TOKIF • Wilayah: Provinsi Kepulauan Riau • Bukti pendukung: Piagam Penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Kepri • Nomor Piagam: W.32.UM.01.02-4005 • Tanggal: 27 Mei 2024
17	Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan	Peringkat Terbaik 6 Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan Tahun 2025



RANCANG BANGUN

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah, dengan fungsi utama meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan. Upaya ini mendukung misi strategis peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan SDM yang berdaya saing, yang diukur melalui indikator seperti Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting pada balita. Pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan kesehatan sendiri merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar manusia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bermutu, termasuk ketersediaan dan mutu sediaan farmasi. Obat, vaksin dan perbekalan kesehatan menjadi unsur penting dalam pelayanan kesehatan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan terstandar di fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menjamin ketersediaan dan kualitas obat, termasuk penerapan regulasi ketat, pengadaan yang terencana, sistem pemantauan yang kuat, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu, edukasi masyarakat tentang penggunaan obat yang bijak dan pengendalian harga turut menjadi bagian dari strategi meningkatkan akses dan efektivitas layanan kefarmasian. Semua ini ditujukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh obat yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan logistik farmasi di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan tersebut meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan Obat yang belum optimal, minimnya anggaran untuk pemenuhan Instalasi Farmasi sesuai Standar, obat kadaluarsa, serta terbatasnya peralatan penyimpanan dan sistem informasi. Oleh karena itu, Aksi Perubahan yang diusulkan bertujuan untuk mendorong transformasi menuju UPTD Instalasi Farmasi yang sesuai standar internasional ISO 9001:2015 dan Good Storage Distribution Practice (GSDP) WHO, sebagai upaya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan farmasi di daerah.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan OPD yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, mencakup penyusunan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan. Peran ini mendukung misi ketiga Pemerintah Provinsi, yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan SDM yang berdaya saing, yang tercermin dari peningkatan Angka Harapan Hidup dan penurunan stunting.

Pembangunan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2023. Upaya ini meliputi layanan kesehatan yang bermutu, edukasi, peningkatan gizi, serta pengendalian penyakit. Dalam hal ini, fasilitas kefarmasian memegang peranan penting dalam pengelolaan sediaan farmasi seperti obat, vaksin, dan alat kesehatan.

Namun, UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain penyusunan RKO yang belum optimal, tingginya jumlah obat kadaluarsa, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta kendala dalam pemastian mutu sediaan farmasi.

Permasalahan tersebut berasal dari tiga aspek utama, yaitu keterbatasan data, sumber daya manusia, dan sarana teknis. Ketidadaan sistem data yang terintegrasi dan standar menyebabkan informasi tersebar, tidak terdigitalisasi, dan menyulitkan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat.

Menyadari pentingnya sistem logistik farmasi yang andal, Aksi Perubahan disusun untuk mendorong UPTD Instalasi Farmasi menerapkan standar ISO 9001:2015 dan pedoman GSDP WHO. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan mutu layanan, efisiensi distribusi, dan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

TESTIMONI



Heri Radison, SKM., MKM., QGIA.
Sekretaris Dirjen Farmasi & Alkes Kemenkes RI

“

Kepri berhasil menunjukkan standar mutu internasional di tingkat daerah. Ini capaian yang sangat membanggakan dan patut menjadi contoh nasional.”

“

Inovasi Instalasi Farmasi Kelas Dunia ini membuktikan bahwa Kepri mampu menghadirkan pelayanan kesehatan berstandar global. Saya sangat mengapresiasi.”



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M
Gubernur Kepulauan Riau

“

“Capaian ISO dan GSDP WHO ini adalah bukti kerja keras tim dalam meningkatkan mutu layanan logistik farmasi di Kepri.”



Dr. Moh. Bisri, SKM., M.Kes
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kepri

TESTIMONI



Retno Riswati, S.Si., Apt
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bintan

“

“Inovasi ini sangat membantu kabupaten/kota karena mutu distribusi dan ketersediaan obat kini jauh lebih terjangkau.”

“

“Sertifikasi ini menegaskan bahwa pelayanan farmasi di Kepri semakin profesional, terukur, dan setara dengan standar internasional.”



dr. Yosei Susanti, M.A.P
Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Kepri

“

“Mutu logistik farmasi yang meningkat ini mendukung program kesehatan masyarakat secara langsung dan signifikan.”



dr. Raja Dina Iswanty
Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Prov. Kepri

TESTIMONI

"UPTD Instalasi Farmasi Kepri menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap persyaratan ISO 9001:2015 dan GSDP WHO. Sangat layak mendapatkan sertifikasi."



"Kami melihat komitmen kuat dari tim Kepri dalam penerapan standar mutu. Ini salah satu implementasi terbaik di daerah."



**Ratna Sari Harahap,
S. Farm, Apt**



**Marhamah,
S. Farm**



**Fitria Syarini,
S. Kep**



**Nofriandi,
S. Farm, Apt**



**Lizawati,
S. Farm, Apt**



**Tria Handayani,
S. Farm, Apt**



**Vincha RG.
Anda,
S. Farm**

"

Kepala UPT BPAK Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau
Keberhasilan ini bukan hanya pencapaian teknis, tapi juga motivasi bagi kami untuk dapat mereplikasi Inovasi dan menjaga kualitas pelayanan demi kesehatan masyarakat dengan sediaan farmasi, obat, vaksin yang aman, terjamin kualitas dan berkehasiat.



PROPOSAL INOVASI

SILOVe

SISTEM INFORMASI LOGISTIK OBAT & VAKSIN ELEKTRONIK

**KATEGORI
PELAYANAN PUBLIK**

2025

**INDRI AYU NINGSIH, S.Farm., M.Farm, Apt
NURGAYA ARISTANTYA, S.Farm, Apt**

UPTD Instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



Profil



UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan inovasi dengan nama "SILOVe" (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik). Inovasi ini digagas oleh dua orang tenaga kesehatan yang bertugas di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

Indri Ayu Ningsih, S.Farm., M.Farm, Apt

Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Nomor STR : AO00000355360232

Nurgaya Aristantya, S.Farm, Apt

Apoteker Ahli Pertama
Nomor STR : 062872223-81051802

Aplikasi SILOVe telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, serta telah direplikasi di empat daerah, yaitu Provinsi Jambi, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga, dengan data sebagai berikut:

01. Jurnal ilmiah terpublikasi DOI : 10.25077/josi.v18.n2.p97-106.2019 pada Jurnal Optimalisasi Sistem Industri dengan judul *"Evaluation and Development of Annual Drug Provides Planning at the Riau Islands Province Pharmaceutical Installation"*.
02. Pengembangan APLIKASI pengelolaan obat dan vaksin pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nama : SILOVe (sistem informasi logistik obat dan vaksin elektronik) telah dilakukan pendaftaran Merk Hak Cipta dengan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : EC00202438950 tanggal 17 Mei 2024.
03. Replikasi oleh Provinsi Jambi surat dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : S-0708/Diskes 5.1/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal : Permohonan Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SILOVe.
04. Replikasi oleh Kota Tanjungpinang surat dari Kepala UPTD Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Kota Tanjungpinang Nomor : 800/909/5.2.01/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal : Permohonan Replikasi dan Sosialisasi Aplikasi Persediaan Obat.
05. Replikasi oleh Kabupaten Karimun surat dari Kepala UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Kabupaten Karimun Nomor : 400.757031/BPFAK/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 perihal : Permohonan Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SILOVe.
06. Replikasi oleh Kabupaten Lingga surat dari Kepala UPT BPFAK Kabupaten Lingga Nomor : 056/UPT BPFAK-TU/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal : Permohonan Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SILOVe.

Sehaptu Sirih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Proposal Inovasi SILOVe (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) ini dapat disusun dengan baik. Proposal ini merupakan bentuk komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya UPTD Instalasi Farmasi, dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sediaan farmasi, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, serta berbasis digital.

Lahirnya inovasi SILOVe berawal dari kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan logistik obat dan vaksin secara cepat, tepat, dan akurat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan publik, aplikasi ini dikembangkan menjadi platform berbasis web yang mampu menghubungkan data farmasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Inovasi ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi Good Pharmacy Practice dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kepulauan Riau.

Proposal ini memuat latar belakang, tujuan, manfaat, tahapan pengembangan, hingga hasil dan dampak dari pelaksanaan inovasi SILOVe yang telah direplikasi oleh beberapa daerah lain, seperti Provinsi Jambi, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi yang digagas oleh tenaga kesehatan daerah mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, dalam pengembangan inovasi SILOVe. Semoga inovasi ini dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat transformasi digital pelayanan publik di sektor kesehatan.

Tanjungpinang, November 2025

Tim Penulis



Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Dalam hal ini, obat memegang peranan penting karena berfungsi untuk mendiagnosis, mencegah, mengobati, dan menyembuhkan penyakit. Selain itu, vaksin juga menjadi komponen vital karena mampu menimbulkan kekebalan tubuh terhadap mikroorganisme penyebab penyakit. Proses pembuatan vaksin melibatkan penumbuhan, pemurnian, dan formulasi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau diinaktivasi sebelum dikemas dan digunakan.



Ketersediaan obat dan vaksin sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan, dukungan manajemen, pendanaan, serta sumber daya manusia. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), target ketersediaan obat sesuai kebutuhan adalah 80%, sedangkan pengadaan obat esensial dan generik harus mencapai 100%. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan manajemen pengelolaan obat yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan distribusi dengan dukungan sistem informasi yang akurat dan tepat waktu. Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau telah beroperasi sejak tahun 2006 dan mengalami pengembangan kelembagaan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2023, yang diikuti dengan peresmian gedung baru pada 15 Juli 2024 di Tanjungpinang.



Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan integrasi data, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Obat terpadu berbasis web untuk mendukung pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengelolaan obat di UPTD Instalasi Farmasi dilakukan melalui aplikasi SILOVe (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik). Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, pengelolaan vaksin juga perlu diintegrasikan dengan aplikasi SMILE yang dikembangkan oleh UNDP dan Kementerian Kesehatan RI. Meskipun demikian, aplikasi SMILE masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat diselaraskan secara optimal dengan SILOVe.

Tujuan

Terwujudnya peningkatan (upgrade) aplikasi berbasis web Sistem Informasi Pengelolaan Obat dan Vaksin di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Aplikasi SILOVe (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik), serta terlaksananya penggunaan aplikasi berbasis web dan tersedianya data terintegrasi pengelolaan obat dan vaksin untuk mendukung ketersediaan obat dan vaksin di seluruh instalasi farmasi kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau.



Manfaat

Adapun manfaat Aplikasi SILOVe adalah untuk memperoleh data yang cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan kebijakan terkait pengelolaan obat dan vaksin. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pemantauan kondisi ketersediaan obat dan vaksin di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau serta di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau secara terintegrasi dan berkesinambungan.



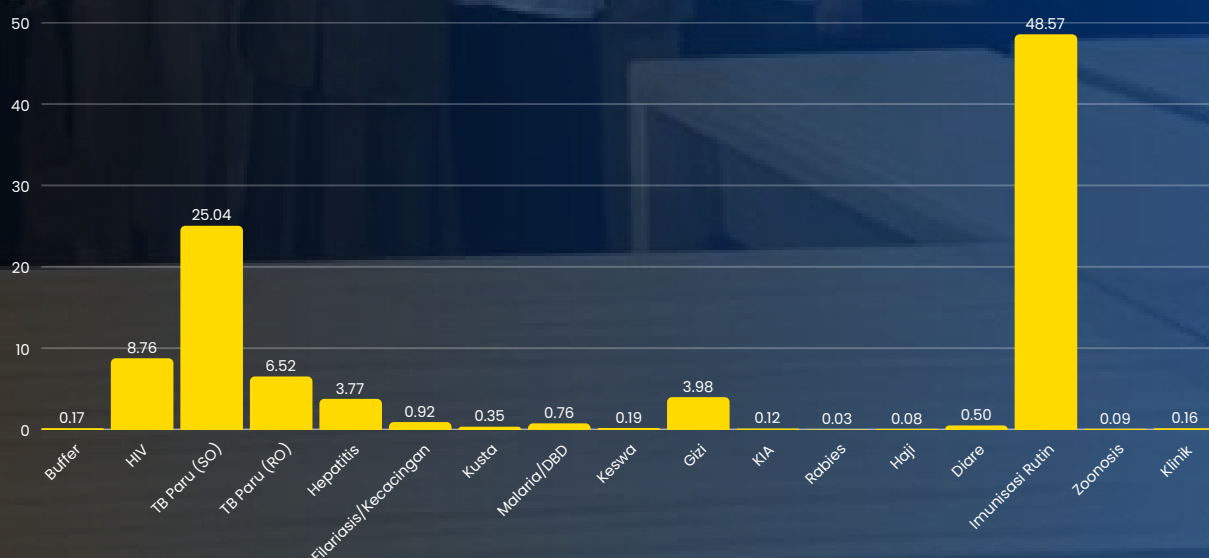
PENGADAAN DAN REALISASI SERTA PERSENTASE PENGADAAN OBAT DAN BMHP TAHUN 2024

No	Nama Kegiatan	Sumber	Jumlah Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Persentase
1	Program Gizi	DAK	2.289.551.620	2.188.596.020	95,59%
2	Program Kesehatan Ibu	DAK	29.476.714	26.964.600	91,48%
3	Program Kesehatan Anak	DAK	82.601.666	38.805.594	46,98%
4	Belanja obat-obatan Buffer	APBD	106.045.692	86.270.597	81,35%
5	Belanja obat klinik	APBD	85.818.250	79.598.766	92,75%
Total			2.593.493.942	2.420.235.577	93,32%



PENERIMAAN OBAT, VAKSIN DAN BMHP TAHUN 2024

No	Program	Nilai	Persentase (%)
1	Buffer	94.592.979,10	0,17
2	HIV	4.876.162.295,00	8,76
3	TB Paru (SO)	13.940.499.268,00	25,04
4	TB Paru (RO)	3.632.639.070,00	6,52
5	Hepatitis	2.100.238.968,54	3,77
6	Filariasis/Kecacingan	512.915.200,00	0,92
7	Kusta	194.409.864,08	0,35
8	Malaria/DBD	421.415.146,00	0,76
9	Keswa	104.798.745,00	0,19
10	Gizi	2.216.044.020,00	3,98
11	KIA	65.770.194,00	0,12
12	Rabies	17.123.397,50	0,03
13	Haji	46.925.250,00	0,08
14	Diare	279.588.190,00	0,50
15	Imunisasi Rutin	27.042.325.574,33	48,57
16	Zoonosis	48.066.000,00	0,09
17	Klinik	86.964.366,00	0,16
Total			



Perjalanan Silove



1

Aplikasi SILOVe (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.



2



Pengembangan Aplikasi berbasis web dengan Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau pada Senin, 10 Februari 2025

3

Sosialisasi dan Replikasi SILOVe di Provinsi Jambi pada Kamis, 26 Juni 2025

4

Sosialisasi dan Replikasi SILOVe di Kota Tanjungpinang pada Selasa, 24 Juni 2025

5



Sosialisasi dan Replikasi SILOVe di Kabupaten Karimun pada Senin, 22 Juni 2025



6

Sosialisasi dan Replikasi SILOVe di Kabupaten Lingga pada Senin, 14 Juli 2025



*“Ketika data, teknologi, dan dedikasi
berpadu, lahirlah sistem yang tidak hanya
mengelola obat, tetapi juga menjaga harapan
hidup setiap manusia.”*



SILOVe

SISTEM INFORMASI LOGISTIK OBAT & VAKSIN ELEKTRONIK

No	Indikator	Keterangan
1	Nama Inovasi Daerah	"SILOVe" Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik
2	Tahapan Inovasi	Implementasi / Penerapan yang sudah terlaksana dari Tahun 2019 untuk local host dan dilakukan pengembangan berbasis web pada Februari 2025
3	Inisiator Inovasi Daerah	UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
4	Nama Inisiator Inovasi Daerah	Tim Kerja UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau • Indri Ayu Ningsih, M. Farm, Apt selaku Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau • Nurgaya Aristantya, S. Farm, Apt selaku Jabatan Fungsional Apoteker Ahli Pertama
5	Klasifikasi Inovasi Daerah	Inovasi Perangkat Daerah
6	Koordinat	0° 52' 49" N 104° 27' 20" E
7	Jenis Inovasi	Pelayanan Publik berbasis Digital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi
8	Bentuk Inovasi	Inovasi Pelayanan Publik
9	Inovasi Tematik	Inovasi bidang kesehatan berbasis web dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pengelolaan Sediaan Farmasi, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
10	Urusan Inovasi Daerah	Uji coba dilakukan pada Tahun 2019, melalui publikasi ilmiah Jurnal ilmiah terpublikasi DOI : 10.25077/josi.v18.n2.p97-106.2019 pada Jurnal Optimalisasi Sistem Industri dengan judul "Evaluation and Development of Annual Drug Provides Planning at the Riau Islands Province Pharmaceutical Installation". Penulis Indri Ayu Ningsih, S. Farm, M. Farm, Apt.
11	Waktu Uji Coba Inovasi Daerah	Uji coba dilakukan pada Tahun 2019, melalui publikasi ilmiah Jurnal ilmiah terpublikasi DOI : 10.25077/josi.v18.n2.p97-106.2019 pada Jurnal Optimalisasi Sistem Industri dengan judul "Evaluation and Development of Annual Drug Provides Planning at the Riau Islands Province Pharmaceutical Installation". Penulis Indri Ayu Ningsih, S. Farm, M. Farm, Apt.

LANJUTAN...

No	Indikator	Keterangan
12	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Penerapan inovasi secara resmi berbasis web dimulai pada Januari 2025, pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Pergub Kepri No. 30 Tahun 2023 s.d. saat ini
13	Waktu Pengembangan Terbaru Inovasi Daerah	Pengembangan terbaru dilakukan pada Februari 2025, ditandai dengan: • Pengembangan aplikasi SILOVe (logistik obat dan vaksin elektronik) berbasis web. • Pengajuan Hak Cipta pada Kementerian Hukum. • Melakukan Sosialisasi penggunaan dan keunggulan aplikasi ke Kabupaten/Kota dan Daerah lain. • Replikasi Aplikasi pada Tahun 2025 di Provinsi Jambi, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun.
14	Tujuan Inovasi Daerah	Terwujudnya upgrade aplikasi berbasis web Sistem Informasi Pengelolaan Obat dan Vaksin di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau yaitu Aplikasi SILOVe (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik), terlaksananya penggunaan aplikasi berbasis web serta tersedianya data terintegrasi pengelolaan obat dan vaksin untuk mendukung ketersediaan obat dan vaksin di seluruh Instalasi Farmasi kabupaten / kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
15	Manfaat Inovasi Daerah	Adapun manfaat Aplikasi SILOVe ini adalah : Mendapatkan data yang cepat, tepat dan akurat, dapat mempercepat pengambilan kebijakan terkait pengelolaan obat dan vaksin, terpantaunya kondisi ketersediaan obat dan vaksin di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kepulauan Riau.
16	Anggaran	Anggaran pelaksanaan inovasi SILOVe bersumber dari: • Dana operasional UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri (APBD 2025), untuk pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi pengembangan produk. • Dana swadaya tenaga kesehatan/penggagas untuk riset dan publikasi ilmiah.
17	Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Pengajuan Hak Ciptaan "SILOVe" • Pendaftaran Hak Cipta Aplikasi SILOVe. • Pengembangan APLIKASI pengelolaan obat dan vaksin pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nama : SILOVe (sistem informasi logistik obat dan vaksin elektronik) telah dilakukan pendaftaran Merk Hak Cipta dengan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : EC00202438950 tanggal 17 Mei 2024.

Rancang Bangun

Inovasi SILOVe dirancang sebagai model tata kelola pelayanan kefarmasian yang terintegrasi dengan Pokok perubahan yang dilakukan adalah:

- Transformasi pola Pengelolaan Sediaan Farmasi, Vaksin melalui peningkatan akses digitalisasi di Instalasi Farmasi Pemerintah.
- Digitalisasi sistem logistik dan perencanaan kebutuhan obat melalui aplikasi SILOVe untuk menjamin ketersediaan obat esensial secara efisien.
- Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dengan pelatihan, pengembangan aplikasi terintegrasi, dan publikasi ilmiah.
- Kemitraan lintas sektor (Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, Kemenkumham, Instalasi Farmasi Provinsi Jambi dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau) untuk memastikan keberlanjutan inovasi.

Ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan dengan perluasan wilayah binaan, serta integrasi dengan platform pelayanan kesehatan digital lainnya sehingga SATU DATA dapat diwujudkan. Inovasi ini diharapkan menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola pelayanan kefarmasian yang adaptif dan berbasis web di wilayah kepulauan dan perbatasan. Inovasi SILOVe merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola pelayanan kefarmasian berbasis digitisasi dan orisinil. Rancang bangun inovasi ini menggabungkan tiga pilar utama: pelayanan kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi dan vaksin, dan pemanfaatan SDM yang ada. Dasar hukum pelaksanaan inovasi ini antara lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan daerah dalam urusan kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Permendagri Nomor 104 Tahun 2022 tentang Tata Cara Inovasi Daerah.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tugas Pokok UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.

Tahapan Inovasi "SILOVe"

1. Identifikasi Masalah (2018-2019):

- Terbatasnya pemanfaatan Tata kelola Sediaan Farmasi dan Vaksin.
- Tingginya Nilai Obat Expired yang tidak dikelola pencatatan yang baik.
- Belum optimalnya sistem logistik obat.

2. Perencanaan Inovasi (Tahun 2019):

- Penyusunan proposal inovasi oleh tenaga kesehatan di UPTD Instalasi Farmasi.
- Publikasi Ilmiah pada Jurnal JOSI.
- Penggalangan komitmen dan dukungan stakeholder.

3. Uji Coba (Agustus-Desember 2024):

- Uji logistik berbasis aplikasi awal SILO Ve (berbasis local host).
- Pendaftaran HAK CIPTA ke Kementerian Hukum RI.

4. Penerapan (Februari 2025):

- Peluncuran aplikasi SILOVe (logistik obat & vaksin elektronik).
- Menggandeng Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau untuk pengembangan Aplikasi berbasis web.

5. Pengembangan (Maret 2025 – sekarang):

- Akses dimanapun bisa dilakukan untuk pencatatan, pendistribusian serta pelaporan stok sediaan farmasi dan vaksin.
- Replikasi Aplikasi oleh sejumlah daerah yang belum memiliki Aplikasi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Vaksin.

Hasil Inovasi

Produk Aplikasi berbasis web yang terintegrasi



Pengembangan APLIKASI pengelolaan obat dan vaksin pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nama : SILOVe (sistem informasi logistik obat dan vaksin elektronik) telah dilakukan pendaftaran Merk Hak Cipta dengan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : EC00202438950 tanggal 17 Mei 2024.



Jurnal ilmiah terpublikasi DOI : 10.25077/josi.v18.n2.p97-106.2019 pada Jurnal Optimalisasi Sistem Industri dengan judul "Evaluation and Development of Annual Drug Provides Planning at the Riau Islands Province Pharmaceutical Installation".

PEREMINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
Jalan SRI RAJAKUMANDU No. 58 Palembang
 Telp. (071) 62701 Fax. (071) 61115 Website: www.dinas.keperawatan.go.id

Jambi, 24 Juni 2025

Kepada
 YN. Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Kepulauan Riau
 di
 Tempat

Nomor : S-^{RA} /Dikes-5.1/VI/02025
Substansi : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Pertama : Penunjukan Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SLOVE

Solusi dengan upaya Peningkatan, Pengelolaan Obat dan Vaksin serta Perbaikan Kesehatan di Wilayah Provinsi Jambi, dan dalam rangka penyediaan informasi inovasi Pelayanan Publik, dengan ini Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, khususnya Instalasi Farmasi Provinsi Jambi meminta adanya Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, sosialisasi dan replikasi Aplikasi SLOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) yang telah diterapkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal Tempat Waktu Agenda	Kamis, 26 Juni 2025 Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 08.00 s.d. selesai Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SLOVE (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik)
--	---

Unda informasi lebih lanjut agar dapat menghubungi: Seti Bati Yurianta, S. Farm (0853-782-01176)

Dengan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

(Signature)
 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 NIP.19671025.199603.1.003

PEMERINTAH KOTA TANGJUNGPINANG
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYULUH DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD BALAI PENGENDALIAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
Jl. Ratu Kalikatur Km. 1 Tanjung Raga Kota Tanggung Kota - Tanggung
Telepon (081) 7553327 Fax (081) 7553327

Tanggung, 23 Juni 2025

Nomor : 800/909/S.2.1.01/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Replikasi dan Sosialisasi Aplikasi Peredaran Obat

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
 c/ Instalasi Farmasi
 @ Tanggung

Sehubungan dengan upaya Pengelolaan Obat dan Vaksin serta Perbekalan Kesehatan di Kota Tanggung, dan dalam rangka penyebarluasan informasi inovasi Pelayanan Publik, dengan ini UPTD BPFAK Kota Tanggung meminta adanya *Best Practice* UPTD Instalasi Farmasi, Replikasi dan sosialisasi Aplikasi SiLOVe (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) yang telah diterapkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 24 Juni 2025

Tempat : BPFAK Kota Tanggung

Waktu : 09.00 – selesai

Agenda : *Best Practice* UPTD Instalasi Farmasi, Replikasi dan sosialisasi Aplikasi SiLOVe (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik)

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD BALAI PENGENDALIAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN KOTA TANGJUNGPINANG

RATU SAFA HANANIP, S. Farm., Apt
Petugas
 NIP. 19820212 201001 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS KESEHATAN
UPT. PRAKTIK INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
A. Yos Sudarso No. 15 Tepi Duri 72062
TANJUNG BALAI KARIMUN

Tanjung Bera Karimun, 19 Juni 2025

Nomor : 400 / T. 7403/BP/AA/VIC/023
Sifat : Penting
Paraf : Pemohonan Suku cadang
Replaisir Aplikasi SL/Ow

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
di
Tempat
Dengan Hormat,

Selubungan dengan surat Pengiriman Pengiriman Obat dan Vaksin serta
Perwakilan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Karimun, dan dalam rangka
penyediaan informasi secara langsung kepada Publik, dengan ini BP/AFK Kabupaten
Karimun meminta adanya Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, suku cadang dan replaisir
Aplikasi SL/Ow. (Simpan Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) yang telah
dikirimkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2025
Tempat : BP/AFK Kabupaten Karimun
Waktu : 09.00 – selesai
Agenda : Best Practice UPTD Instalasi Farmasi, suku cadang dan
replaisir aplikasi SL/Ow. (Simpan Informasi Logistik
Obat dan Vaksin Elektronik)

Jajar harapan kami agar dapat difasilitasi sebagai meringkas Sumber
keuangan : Rp. 0/- (Gedong 000). Demikian disampaikan, atas perhatian dan
kerjasama diharapkan terimakasih.

Kepala UPTD Instalasi Farmasi
dan Alat Kesehatan
Kabupaten Karimun

Berkas 1
Materi 1
No. 19/018/2019/2 : 1.01

Dipindai dengan CamScanner

	KEMENTERIAN KASIHATAN NEGARA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENGOBUK dan KELUARGA BERGUNA UPT BALAI PENGENDALIAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN Jalan Cendrasasih, Singaperbangsa/Kepulauan Riau 29871 P-065 84.39994@kkes.go.id	
	Date: Singaperbangsa, 20 Juni 2020	
Nomor:	025/SPT BPPAK-TJ/2020	
Grafik:	Basis	TN: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Lampiran:	Pemohonan Sosialisasi dan Replikasi Aplikasi SLOVAs	di-
Perihal:		<u>Sosialisasi</u>
Selubungan dengan upaya Pemertigaraan Pengawasan Obat dan Vaksin serta Pelaksanaan Kegiatan di Wilayah Kabupaten Lingga, dalam rangka penyediaan informasi inovasi Pelayanan Publik, dengan ini UPT BPPAK Kepulauan Lingga meminta adanya <i>Best Practice</i> UPTD Instalasi Farmasi, sosialisasi dan replikasi Aplikasi SLOVAs (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik) yang telah diterapkan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan akan dilaksanakan pada:		
Hari / tanggal :	Senin, 14 Juli 2020	
Tempat :	UPT BPPAK Kepulauan Lingga	
Waktu :	08.00 - selesai	
Agenia :	<i>Best Practice</i> UPTD Instalasi Farmasi, sosialisasi dan replikasi Aplikasi SLOVAs (Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin Elektronik)	
Besak harapannya agar dapat difasilitasi. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan kalian ucapkan terima kasih.		
 Kepala UPT BPPAK Kepulauan Lingga NIP. 1985022117200640230		
Tembusan Kepada Yth: 1. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga 2. Amplop		

KABUPATEN LINGGA

Dokumentasi



20
25

UPTD INSTALASI FARMASI

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
"Bandar Seri Kota Piring" Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
Lantai 2 dan 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur -
Tanjungpinang

